



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO



Abd Hamid Wahid, M.Ag
Bupati Bondowoso

As'ad Yahya Syafi'i, S.E
Wakil Bupati Bondowoso

LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025

TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Alloh, SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan dan menyajikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 tepat waktu.

Laporan ini berisi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dari Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, LPPD ini juga merupakan alat komunikasi dan pengikat hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta sebagai alat bantu dalam pembinaan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, khususnya untuk penyusunan kebijakan otonomi daerah kedepannya yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap bahwa melalui penyusunan LPPD ini, akan tersaji laporan yang rinci tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024. Meskipun demikian, kami mengakui bahwa LPPD ini belum sempurna, dan kami menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus berusaha melakukan perbaikan di tahun-tahun yang akan datang. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LPPD ini.

Akhir kata, kami berharap LPPD ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Bondowoso dan semoga Alloh, SWT selalu memberikan rahmat dan petunjukNya kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Bondowoso, Maret 2025



DAFATAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 LATAR BELAKANG	3
1.1.1 Penjelasan Umum	3
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	19
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	30
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	32
2.1 Capaian Kinerja Makro	32
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	41
2.2.1 Indikator Kinerja Hasil	43
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Penunjang Urusan Pemerintahan	61
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	64
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	103
3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan	103
3.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya	103
1.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	103
2 .Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu pintu Pintu Dan Tenaga Kerja.....	107
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	109
4.1 Bidang Urusan Pendidikan	109
4.2 Bidang Urusan Kesehatan	125
4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum	151
4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat	158
4. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	161
4.6 Bidang Urusan Sosial	175
BAB V PENUTUP	195

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

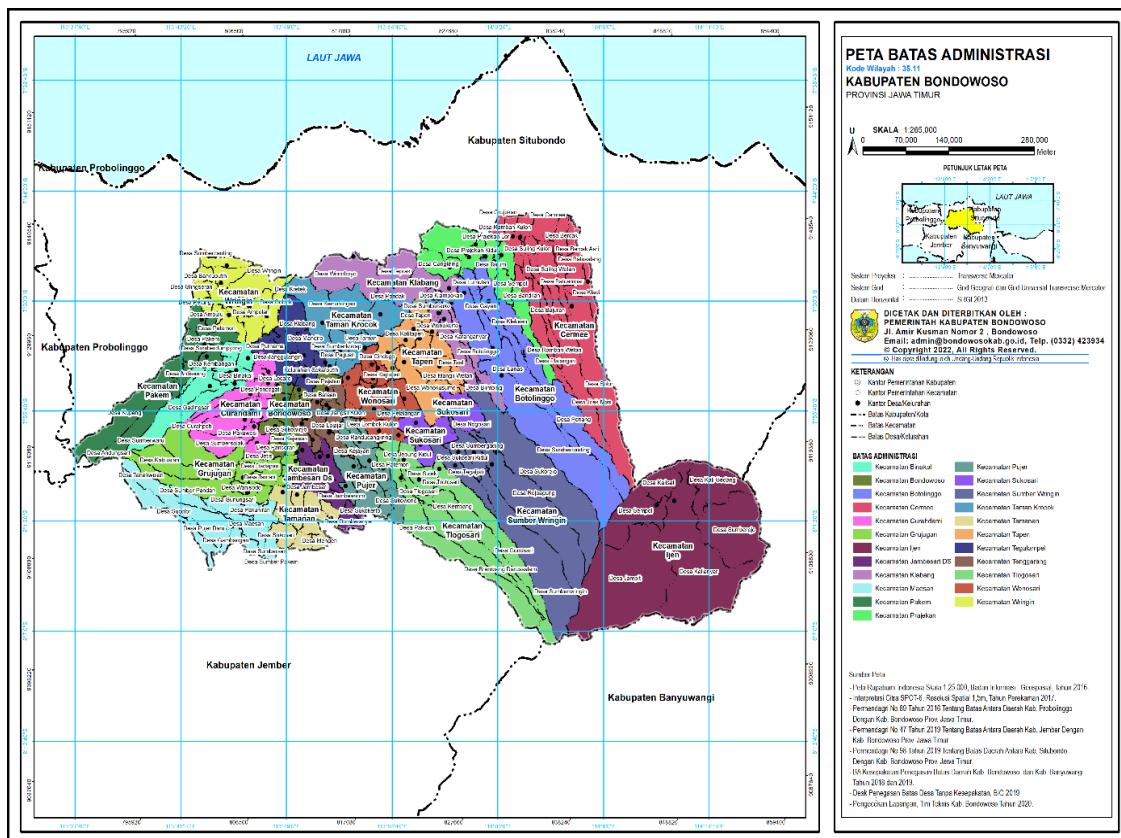
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelayanan Publik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025;
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Data Geografis Wilayah

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

1. Sebelah utara dengan Kabupaten Situbondo;
2. Sebelah timur dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi;
3. Sebelah selatan dengan Kabupaten Jember;
4. Sebelah barat dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.

Gambar 1. 1
Peta Administratif



Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Kab. Bondowoso, 2024

Kabupaten Bondowoso secara geografis berada di wilayah bagian Timur Propinsi Jawa Timur dengan jarak sekitar 200 km dari ibu kota Propinsi Jawa Timur, Surabaya. Kabupaten Bondowoso terletak pada posisi $7^{\circ}50'10''$ sampai $7^{\circ}56'41''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}48'10''$ sampai $113^{\circ}48'26''$ Bujur Timur.

Wilayah Kabupaten Bondowoso sebelah barat dan utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember. Luas Wilayah Kab. Bondowoso mencapai 1. 560,10 Km² yang terbagi menjadi 23 Kecamatan, 209 desa dan 10 Kelurahan.

Ketinggian dari permukaan laut rata-rata mencapai \pm 347 meter diatas permukaan laut. Wilayah tertinggi \pm 3.287 mdpl dan terendah \pm 54 meter. Kondisi dataran di Kab. Bondowoso terdiri dari pegunungan dan perbukitan seluas 44,4%, dataran tinggi 24,9 % dan dataran rendah 30,7 % dari luas wilayah secara keseluruhan.

Pegunungan yang ada di Kabupaten Bondowoso adalah pegunungan Ijen yang terletak di bagian timur dan pegunungan Argopuro di sebelah barat. Sementara itu ada sekitar 35 sungai yang mengaliri Kabupaten Bondowoso antara lain yaitu sungai Deluang, sungai Sampeyan Baru, sungai Mrawan, sungai Tлага, sungai Wonoboyo, dll.

Tabel 1. 1
Pembagian Wilayah Administrasi
Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jarak Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)
1	Maesan	Maesan	-	12	62	13	5.608,30
2	Grujungan	Taman	-	11	49	7	7.44,70
3	Tamanan	Taman	-	9	52	15	2.815,10
4	Jambesari DS	Jambesari	-	9	41	10	3.010,50
5	Pujer	Kejayan	-	11	80	12	3.988,90
6	Tlogosari	Pakisan	-	10	98	17	11.091,70
7	Sukosari	Sukosari Lor	-	4	31	22	2.317,27
8	Sbr. Wringin	Sbr. Wringin	-	6	71	27	13.794,73
9	Tapen	Tapen	-	9	52	16	5.704,20
10	Wonosari	Wonosari	-	12	72	10	4.227,20
11	Tenggarang	Tenggarang	1	11	69	2	2.579,50
12	Bondowos	Dabasah	7	4	19	2	2.315,80
13	Curahdami	Curahdami	1	11	111	3	5.028,59
14	Binakal	Binakal	-	8	51	7	3.903,91
15	Pakem	Patemon	-	8	47	18	6.208,20
16	Wringin	Wringin	-	13	92	16	5.801,00
17	Tegalampel	Sekarputih	1	7	54	2	3.702,75
18	Taman Krocok	Taman	-	7	47	12	5.300,35
19	Klabang	Klabang	-	11	49	19	9.120,40
20	Botolinggo	Lumutan	-	8	100	25	12.741,45
21	Ijen	Sempol	-	6	38	74	20.720,00
22	Prajekan	Prajekan Lor	-	7	34	24	5.664,55
23	Cermee	Cermee	-	15	93	32	12.920,40
JUMLAH			10	209	1.412	385	156.010,00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Kab. Bondowoso, 2024

C. Jumlah Penduduk

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
di Kabupaten Bondowoso, 2024

Kecamatan Subdistrict	Jeni Kelamin Gender		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
MAESAN	24294	24918	49212
TAMANAN	19654	19881	39535
TLOGOSARI	23023	24055	47078
SUKOSARI	7473	8080	15553
PUJER	19733	20861	40594
GRUJUGAN	18824	19341	38165
CURAHDAMI	17386	17503	34889
TENGGARANG	21536	22437	43973
WONOSARI	19748	21016	40764
TAPEN	16426	17577	34003
BONDOWOSO	37481	39324	76805
WRINGIN	19873	20882	40755
TEGALAMPEL	13219	13352	26571
KLABANG	9046	9642	18688
CERMEE	22479	23874	46353
PRAJEKAN	12465	13179	25644
PAKEM	11459	11903	23362
SUMBERWRINGIN	17148	17979	35127
SEMPOL	6021	6009	12030
BINAKAL	8291	8775	17066
TAMAN KROCOK	8025	8629	16654
BOTOLINGGO	14213	14897	29110
JAMBESARI DARUS SHOLAH	17588	18488	36076
Bondowoso	385405	402602	788007

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, 2024

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Jumlah desa dan Kelurahan di Kabupaten Bondowoso sebanyak 219 Desa/Kelurahan terdiri dari 10 Kelurahan dan 209 Desa tersebar di 23 Kecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 3
Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Bondowoso

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	MAESAN	SUCOLOR
		PUJER BARU

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		TANAHWULAN MAESAN GAMBANGAN SUGER LOR SUMBER PAKEM SUMBERSARI SUMBER ANYAR PENANGGUNGAN PAKUNIRAN GUNUNGSARI
2	TAMANAN	SUKOSARI KARANG MELOK MENGEN KEMIRIAN TAMANAN WONOSUKO KALIANYAR SUMBER KEMUNING SUMBER ANOM
3	TLOGOSARI	KEMBANG GUNOSARI TROTOSARI JEBUNG KIDUL SULEK TLOGOSARI PAKISAN PATEMON JEBUNG LOR BRAMBANG DARUSSALAM
4	SUKOSARI	SUKOSARI LOR NOGOSARI PECALONGAN KERANG
5	PUJER	ALAS SUMUR KEJAYAN MANGLI MASKUNING KULON MASKUNING WETAN MENGOK PADASAN RANDU CANGKRING SUKO KERTO SUKOWONO

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		SUKODONO
6	GRUJUGAN	TEGAL MIJIN
		PEKAUMAN
		SUMBER PANDAN
		WANISODO
		KABUARAN
		WONOSARI
		DADAPAN
		DAWUHAN
		TAMAN
		GRUJUGAN KIDUL
		KEJAWAN
7	CURAHDAMI	CURAHDAMI
		JETIS
		PAKUWESI
		KUPANG
		PETUNG
		PANAMBANGAN
		CURAHPOH
		PONCOGATI
		SUMBER SUKO
		SELOLEMBU
		LOCARE
		SUMBER SALAK
8	TENGGARANG	TENGGARANG
		KESEMEK
		LOAJAR
		PEKALANGAN
		KAJAR
		SUMBER SALAM
		KONCER KIDUL
		BATAAN
		GEBANG
		DAWUHAN
		TANGSIL KULON
		KONCER DARUL AMAN
9	WONOSARI	LOMBOK KULON
		LOMBOK WETAN
		TUMPENG
		JUMPONG
		TANGSIL WETAN
		PASAREJO
		BENDOARUM
		KAPURAN

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		SUMBERKALONG TRAKTAKAN WONOSARI PELALANGAN
10	TAPEN	WONOKUSUMO MANGLI WETAN TAAL MRAWAN GUNUNG ANYAR JURANG SAPI CINDOGO KALITAPEN TAPEN
11	BONDOWOSO	NANGKAAN TAMANSARI KADEMANGAN DABASAH BADEAN KOTAKULON BLINDUNGAN PANCORAN SUKOWIRYO KEMBANG PEJATEN
12	WRINGIN	AMBULU BUKOR SUMBERMALANG JAMBEWUNGU GUBRIH AMPELAN JATITAMBAN BANYUWULU JATISARI GLINGSERAN BANYUPUTIH WRINGIN SUMBERCANTING
13	TEGALAMPEL	SEKARPUTIH KLABANG MANDIRO TANGGULANGIN KARANGANYAR TEGALAMPEL KLABANG AGUNG

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		PURNAMA
14	KLABANG	KARANG ANYAR
		BLIMBING
		KARANG SENGON
		WONOKERTO
		KLABANG
		KLAMPOKAN
		SUMBER SUKO
		BESUK
		PANDAK
		LEPRAK
		WONOBOYO
15	CERMEE	SOLOR
		KLADI
		BERCAK
		SULING WETAN
		SULING KULON
		CERMEE
		RAMBAN WETAN
		GRUJUGAN
		RAMBAN KULON
		BAJURAN
		JIREK MAS
		BATU SALANG
		PALALANGAN
		BATU AMPAR
		BERCAK ASRI
16	PRAJEKAN	BANDILAN
		SEMPOL
		TARUM
		PRAJEKAN LOR
		PRAJEKAN KIDUL
		CANGKRING
		WALIDONO
17	PAKEM	ANDUNGSARI
		ARDISAENG
		KUPANG
		GADINGSARI
		PAKEM
		SUMBERDUMPYONG
		PATEMON
		PETUNG
18	SUMBERWRINGIN	SUKOREJO
		SUMBER GADING

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		SUKOSARI KIDUL TEGALJATI REJO AGUNG SUMBERWRINGIN
19	SEMPOL	SEMPOL KALIANYAR JAMPIT KALISAT KALI GEDANG SUMBER REJO
		GADINGSARI
		SUMBER WARU
		KEMBANGAN
		BARATAN
		BINAKAL JERUKSOKSOK SUMBER TENGAH BENDELAN
20	BINAKAL	TAMAN GENTONG KEMUNINGAN TREBUNGAN SUMBERKOKAP PAGUAN KRETEK
		LUMUTAN
		BOTOLINGGO
		LANAS
		PENANG
		GAYAM
		KLEKEHAN SUMBER CANTING GAYAM LOR
21	TAMAN KROCOK	JAMBESARI JAMBEANOM PUCANGANOM SUMBERJERUK TEGALPASIR PENGARANG GRUJUGAN LOR PEJAGAN SUMBER ANYAR
		BOTOLINGGO
		LANAS
		PENANG
		GAYAM
		KLEKEHAN
		SUMBER CANTING
		GAYAM LOR
		JAMBESARI
		JAMBEANOM

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Kab. Bondowoso, 2024

E. Jumlah Perangkat Daerah

Struktur dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Terdapat total 50 (lima Puluh) Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bondowoso. Ditambah dengan 1 (satu) Rumah Sakit Daerah. Perangkat Daerah di Kabupaten Bondowoso antara lain terdiri atas:

- a. 1 (satu) Sekretariat Daerah
- b. 1 (satu) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. 1 (satu) Inspektorat;
- d. 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. 17 (tujuh Belas) Dinas;
- f. 6 (enam) Badan; dan
- g. 23 (dua puluh tiga) Kecamatan

Dalam rangka menjalankan tugas utama dan fungsi perangkat daerah. Diperlukan adanya dukungan dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan Publik. Jumlah Pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten Bondowoso mencapai 8.657 Orang.

Tabel 1. 4
Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Dukungan Personil
Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

NO	Nama OPD	JUMLAH PERSONIL ASN		
		JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN PELAKSANA
1	2	3	4	5
1	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6	16	23
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6	9	50
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	7	10
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10	2	16
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7	5	31

NO	Nama OPD	JUMLAH PERSONIL ASN		
		JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN PELAKSANA
1	2	3	4	5
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14	11	35
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	0	14
8	DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	14	21	154
9	DINAS KESEHATAN	5	714	258
10	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3	30	88
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	18	11
12	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7	7	49
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	3	152
14	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA	6	5	19
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	5	22
16	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	8	9	23
17	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	5	15	18
18	DINAS PENDIDIKAN	12	4685	306
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	5	18
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	5	171	24
21	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA	5	11	30

NO	Nama OPD	JUMLAH PERSONIL ASN		
		JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN PELAKSANA
1	2	3	4	5
	KARYA DAN TATA RUANG			
22	DINAS PERHUBUNGAN	8	5	29
23	INSPEKTORAT KABUPATEN	10	23	17
24	KECAMATAN BINAKAL	7	0	15
25	KECAMATAN BONDOWOSO	37	0	41
26	KECAMATAN BOTOLINGGO	6	0	15
27	KECAMATAN CERMEE	8	0	18
28	KECAMATAN CURAHDAMI	12	0	17
29	KECAMATAN GRUJUGAN	4	0	15
30	KECAMATAN IJEN	6	0	9
31	KECAMATAN JAMBESARI DARUSSHOLAH	6	0	7
32	KECAMATAN KLABANG	6	0	15
33	KECAMATAN MAESAN	6	0	16
34	KECAMATAN PAKEM	8	0	8
35	KECAMATAN PRAJEKAN	8	0	12
36	KECAMATAN PUJER	8	0	17
37	KECAMATAN SUKOSARI	7	0	15
38	KECAMATAN SUMBERWRINGIN	6	0	9
39	KECAMATAN TAMAN KROCOK	5	0	8
40	KECAMATAN TAMANAN	6	0	9
41	KECAMATAN TAPEN	4	0	15
42	KECAMATAN TEGALAMPTEL	10	0	17
43	KECAMATAN TENGGARANG	9	0	18
44	KECAMATAN TLOGOSARI	8	0	15
45	KECAMATAN WONOSARI	6	0	14
46	KECAMATAN WRINGIN	7	0	11

NO	Nama OPD	JUMLAH PERSONIL ASN		
		JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN PELAKSANA
1	2	3	4	5
47	RUMAH SAKIT UMUM dr.H.KOESNADI BONDOWOSO	6	353	150
48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11	11	64
49	SEKRETARIAT DAERAH	13	27	114
50	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	9	3	35
51	SEKRETARIAT KPU	0	0	0
Grand Total		390	6171	2096

Sumber data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam APBD Tahun Anggaran 2024 anggaran belanja sebesar Rp 2.273.843.763.136,00 dengan proporsi belanja sebesar 76,39% merupakan Belanja Operasi atau sebesar Rp 1.736.960.252.863,00 Belanja Tidak Terduga sebesar 0,15% atau Rp 3.392.297.787,00 Belanja Modal sebesar 8,99% atau sebesar Rp 204.511.563.257,00 dan Belanja Transfer dengan proporsi sebesar 14,47% atau sebesar Rp 328.979.649.229,00 Realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.637.882.275.688,54 atau 94,30% dari pagu anggaran. Realisasi Belanja Barang Tidak Terduga sebesar Rp 1.395.044.721,00 atau 41,12% dari pagu anggaran. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 158.936.580.871,98 atau 77,72% dari pagu anggaran dan Belanja Transfer sebesar Rp 328.482.350.229,00 atau 99,85% pagu anggaran.

Tabel 1. 5
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.066.614.504.522,00	2.016.026.652.579,11	97,55
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	235.535.997.736,00	255.068.751.500,11	108,29
4.1.01	Pajak Daerah	55.017.001.360,00	46.854.513.560,00	85,16
4.1.02	Retribusi Daerah	28.017.854.910,00	28.751.324.094,15	102,62

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.743.208.145,00	4.743.208.147,23	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	147.757.933.321,00	174.719.705.698,73	118,25
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.789.226.212.786,00	1.721.200.178.985,00	96,20
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.606.658.474.936,00	1.577.972.680.610,00	98,21
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	182.567.737.850,00	143.227.498.375,00	78,45
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	41.852.294.000,00	39.757.722.094,00	95,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	41.852.294.000,00	39.757.722.094,00	95,00
5	BELANJA DAERAH	2.273.843.763.136,00	2.126.696.251.510,52	93,53
5.1	BELANJA OPERASI	1.736.960.252.863,00	1.637.882.275.688,54	94,30
5.1.01	Belanja Pegawai	918.160.536.307,00	883.648.166.907,00	96,24
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	675.101.486.401,00	615.253.552.196,45	91,13
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
5.1.05	Belanja Hibah	139.206.730.155,00	134.777.256.585,09	96,82
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.491.500.000,00	3.203.300.000,00	91,75
5.2	BELANJA MODAL	204.511.563.257,00	158.936.580.871,98	77,72
5.2.01	Belanja Modal Tanah	900.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.360.833.739,00	64.910.963.743,00	93,58
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.886.442.248,00	41.576.207.831,98	54,07
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.529.310.420,00	42.654.931.447,00	89,74
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.875.056.850,00	8.852.351.050,00	99,74
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	959.920.000,00	942.126.800,00	98,15
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.392.297.787,00	1.395.044.721,00	41,12

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.392.297.787,00	1.395.044.721,00	41,12
5.4	BELANJA TRANSFER	328.979.649.229,00	328.482.350.229,00	99,85
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.431.475.529,00	7.431.475.529,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	321.548.173.700,00	321.050.874.700,00	99,85
	SURPLUS/DEFISIT	(207.229.258.614,00)	(110.669.598.931,41)	53,40
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	207.229.258.614,00	207.229.258.614,39	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	177.229.258.614,00	177.229.258.614,39	100,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	207.229.258.614,00	207.229.258.614,39	100,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	96.559.659.682,98	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 (LRA Unaudited)

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Kebijakan pemerintah daerah yang disusun didasarkan pada isu-isu strategis daerah dengan memperhatikan kondisi atau hal yang harus dicermati dalam perencanaan pembangunan yang dampaknya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan antara lain : telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih agar terjadi keselarasan dalam merumuskan isu-isu strategis.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen RKPD tahun 2024 yang disampaikan dalam dokumen LPPD Tahun 2024 merupakan tahapan tahun pertama dari RPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan telah mengacu pada Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Tabel 1. 6
Masukan Permasalahan Aktual/Isu Strategis Di Daerah

NO	POKOK PIKIRAN	FAKTA DILAPANGAN
1	Peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekonomian Bondowoso tumbuh secara positif dari 4,62 % pada tahun 2023. meningkat menjadi 4,87 % pada tahun 2024, tetapi masih lebih rendah, dibandingkan kabupaten sekitar
	Kemampuan keuangan daerah terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 2. PDRB per kapita baik ADHB maupun ADHK Kabupaten Bondowoso selama kurun waktu 2022-2024 (3) tahun terus mengalami peningkatan 3. Tahun 2024 Indeks Ginil Kab. Bondowoso mencapai angka 0.333 menunjukkan Tingkat Ketimpangan Sedang/Moderat 4. Pendapatan daerah sebagian besar dari Dana Transfer Pusat. Dana transfer sebagian besar bersifat spesifik, banyak kegiatan yang bersifat mendatang seperti stunting, kemiskinan, pengangkatan P3K, dan lain lain sehingga anggaran daerah tidak cukup untuk membiayai seluruh kewenangannya.
2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	IKLH Bondowoso Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,28 poin dari tahun 2022 sebesar 67,20 menjadi sebesar 67,48 ditahun 2024
3	Penanganan kemiskinan, pengangguran,dan kesejahteraan sasial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemiskinan tahun 2024 membaik pada level 12,60 % turun sebesar 0.83 poin dari tahun 2023 yg mencapai angka 13,43 %. 2. TPT tahun 20224 mengalami perbaikan pada angka 12,60 dibanding tahun 2023 mencapai angka 13,43

NO	POKOK PIKIRAN	FAKTA DILAPANGAN
4	Peningkatan tata kelola pemerintahan	<p>Capaian penunjang tata kelola pemerintahan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 tercapai Nilai A (86,65) atau terealisasi 100%, namun dibandingkan dengan tahun 2023 katagori nilai A (87,23), ada penurunan di tahun 2024 sebesar 0,58.
5	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	<p>IPM Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan dari 70,56 % pada tahun 2023, meningkat menjadi 71,22 % pada tahun 2024</p>

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi Kabupaten Bondowoso

Visi pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun.

Visi Pemerintahan Kabupaten Bondowoso tahun 2018-20.. adalah “TERWUJUDNYA BONDOWOSO MANDIRI EKONOMI, LESTARI, SEJAHTERA, ADIL DAN TERDEPAN DALAM BINGKAI IMAN DAN TAKWA”.

Visi Pembangunan Kabupaten Bondowoso terdiri dari 5 (lima) kata kunci yaitu: Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan Terdepan, dalam Bingkai Iman dan Takwa yang memiliki makna strategis dan mencerminkan cita-cita, harapan yang ingin diwujudkan masyarakat Bondowoso. Visi Pembangunan Tahun 2018-20.. mengandung pemahaman terjalinnya sinergi yang harmonis antara 3 (tiga) pilar kekuatan pembangunan daerah yaitu pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap proses manajemen pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat.

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Mandiri Ekonomi: adalah terwujudnya kondisi masyarakat Bondowoso yang memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk membangun, dan memelihara kelangsungan hidup dengan mengandalkan kemampuan sendiri secara produktif.
- 2) Lestari: mengandung arti bahwa masyarakat Bondowoso memiliki kemampuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya sehingga kondisinya tetap dapat dipertahankan seperti keadaan semula.
- 3) Sejahtera: adalah kondisi masyarakat Bondowoso yang terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, semua hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di semua wilayah Kabupaten Bondowoso, serta

tercipta adanya kesetaraan kondisi yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya secara proporsional sehingga makmur serta sejahtera lahir dan batin.

- 4) Adil dan Terdepan: mengandung arti adil yang bersifat distributif, yaitu mendapatkan pelayanan yang sama tanpa pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik perseorangan, kelompok, maupun kewilayahan, tanpa korupsi, tanpa pungli maupun jual beli jabatan. Sehingga akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, menciptakan situasi aman, dan tenteram, menghapuskan potensi konflik sosial, taat regulasi dan supremasi hukum, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dengan kondisi tersebut diharapkan 3 (tiga) pilar kekuatan pembangunan, pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan mampu berperan pada posisi terdepan, dalam setiap upaya meraih keunggulan-keunggulan sehingga mampu bersaing dalam segala bidang untuk tercapainya Bondowoso sebagai kawasan agribisnis yang maju, religius, adil dan makmur.
- 5) Iman dan Takwa: adalah kondisi masyarakat Bondowoso dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta derajat kesehatan yang baik, dari semua tingkatan usia, hidup berlandaskan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu, yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, bermuara pada terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi Kabupaten Bondowoso

Misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan hal yang sangat penting memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

- 1) Misi 1: Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan.
- 2) Misi 2: Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif.
- 3) Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

- 4) Misi 4: Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif.
- 5) Misi 5: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul.

3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-20.. adalah sebagaimana disampaikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 7
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan		Sasaran	
Misi 1 : Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan.			
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkualitas	1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan
		2	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata
		3	Meningkatnya Investasi Daerah
		4	Meningkatnya Usaha Skala Mikro
		5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi
Misi 2 : Melestarikan Lingkungan Sebagai Keunggulan Kompetitif			
1	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan
		2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	1	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
		2	Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka
		3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Jujur, Adil, Amanah, Partisipatif Dan Inovatif			
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
2	Terwujudnya Ketetraman dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat	1	Meningkatnya Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan
		2	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat
Misi 5 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Unggul			
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Meningkatnya Derajat Pendidikan
		2	Meningkatnya Derajat Kesehatan
		3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak, serta pemberdayaan pemuda.

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2022

C. Program Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisi grand design perencanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Berbagai strategi yang disusun menggambarkan kemantabahan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Perencanaan yang dilakukan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas dan kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management), strategi dirumuskan berupa pernyataan yang menjelaskan cara mencapai tujuan dan sasaran yang diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Untuk tahun 2024-2026, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menetapkan strategi yang akan dikembangkan sebagai langkah taktis dan efektif, untuk menjamin hasil secara maksimal dari pelaksanaan berbagai program pembangunan, yang merupakan strategi terpadu yang melibatkan dukungan dan komitmen seluruh stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara garis besar, strategi terpadu yang dikembangkan dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan Tahun 2024-2026 dengan prinsip :

1. Menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang
2. Mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah

Tabel 1. 8
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan
Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	1	Mengembangkan agrobisnis perdesaan, revitalisasi pertanian dan perkebunan rakyat, meningkatkan kualitas dan nilai tambah komoditi unggulan, meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi budidaya,

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
				2	penguatan kemitraan antara petani dengan pengusaha
				3	Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi pengolahan, penguatan kemitraan antara petani dengan pengusaha pengolahan, diversifikasi produk unggulan daerah
	1.2	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata		1	Mengembangkan destinasi pariwisata, meningkatkan partisipasi usaha lokal perdesaan dalam industri pariwisata, meningkatkan pengembangan branding Ijen Geopark sebagai Unesco Global Geopark, pengelolaan obyek wisata secara kreatif dan inovatif secara digital
	1.3	Meningkatnya Skala Usaha Mikro		1	Meningkatkan akses usaha mikro terhadap kesempatan pengembangan keterampilan, pendampingan, modal usaha dan teknologi, meningkatkan daya saing usaha mikro dan koperasi menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”)
	1.4	Meningkatnya Investasi Daerah		1	Meningkatkan identifikasi potensi dan promosi investasi serta meningkatkan sistem pelayanan untuk mendorong kemudahan berinvestasi
	1.5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi		1	Percepatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum terutama penunjang ekonomi dan penunjang sektor unggulan lokal, serta penataan ruang secara tepat
				2	Percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi,

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
		1.6	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1	Melakukan sinergi dan meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan transportasi
2	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	2.1	Terkendalinya pertumbuhan Penduduk	1	Pengendalian Kuantitas Penduduk
		2.2	Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	1	Memperluas kesempatan kerja, fasilitasi akses informasi ketenagakerjaan, meningkatkan produktifitas tenaga kerja
		2.3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	1	Melakukan fasilitasi terhadap masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya lokal untuk kemandirian masyarakat
3	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup	3.1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	1	Pengendalian pencemaran air, pencegahan dan pengelolaan timbulnya limbah/sampah, pemulihan akibat pencemaran, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM lingkungan hidup, serta penegakan hukum lingkungan
				2	Pengendalian pencemaran udara
				3	Pengendalian kerusakan tutupan lahan
		3.2	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Prasarana Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan	1	Pencegahan dan pengelolaan timbulnya limbah/sampah, pemulihan akibat pencemaran, serta peningkatan kesadaran masyarakat di lingkungan permukiman untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari
		4.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Menciptakan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien dan optimal
				2	Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik serta pengembangan satu data statistik daerah
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	1	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur yang profesional
				2	Meningkatkan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah, meningkatkan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
					akuntabilitas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan program/kegiatan
				3	Meningkatkan mekanisme Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		4.3	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1	Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan, tokoh agama, cendekiawan dan masyarakat, meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat yang tertib dan taat terhadap peraturan dan Norma, pencegahan serta penanganan konflik sosial dan politik
				2	Meningkatkan perlindungan dan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
5	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	5.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan	1	Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan, peningkatan infrastruktur, sarana prasarana, kualitas pembelajaran dan penguatan manajemen, serta kualitas pelayanan, penguatan pendidikan karakter, fasilitasi pengembangan infrastruktur pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan
		5.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	1	Pemenuhan hak terhadap kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan infrastruktur, sarana prasarana, fasilitasi pengembangan infrastruktur kesehatan serta integrasi jaminan kesehatan
		5.3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberdayaan pemuda	1	Meningkatkan komitmen pentingnya perspektif pemberdayaan gender dan implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan, peningkatan layanan publik bagi penyandang disabilitas
				2	Meningkatkan perlindungan anak dan implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan
				3	Meningkatkan kemandirian pemuda dan implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bondowoso

D. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026

Tabel 1.9
Program Pembangunan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tahun Dasar (2022)	TARGET CARAIAN								Akhir RPD	PD Penanggung Jawab	
				2024		2025		2026		Target	Rp.	Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1 Persentase pertumbuhan PDRB	ADHK	3.88	4.2		4.41		4.82		4.82			
			ADHB	5.92	5.92		5.99		6.28		6.28			
		2 Nilai PDRB per kapita	ADHK	16,368,646.54	16,946,724.31		17,252,686.77		17,621,318.63		17,621,318.63			
			ADHB	28,536,091.32	31,791,845.70		33,577,617.55		35,560,487.37		35,560,487.37			
		3 INDEK GINI		0.365	0.36		0.355		0.35		0.35			
1 1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor	1 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian		4.59	4.71		4.76		4.86		4.86			
3 27	PERTANIAN													
3 27 02	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1 Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan												Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Padi		6.17	6.17		6.17		6.17		6.17			
		Jagung		5.19	5.19		5.19		5.19		5.19			
		Kedelai		1.52	1.52		1.52		1.52		1.52			
		Ubi Kayu		22.78	22.78		22.78		22.78		22.78			
		Cabe Rawit		8.38	8.38		8.38		8.38		8.38			
		Bawang merah		10.38	10.38		10.38		10.38		10.38			
		Jahe		16.11	16.11		16.11		16.11		16.11			
		Kunyit		19.55	19.55		19.55		19.55		19.55			
		Kopi Arabika		0.51	0.51		0.51		0.51		0.51			
		Kopi Robusta		0.48	0.48		0.48		0.48		0.48			
		Tembakau Rajangan		1.05	1.05		1.05		1.05		1.05			
		Tembakau Kasturi		1.65	1.65		1.65		1.65		1.65			
		Tebu		6.70	6.70		6.70		6.70		6.70			
3 27 03	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2 Persentase prasarana yang digunakan		100.00	100.00	1,250,000,000	100.00	1,250,000,000	100.00	1,250,000,000	100.00	1,250,000,000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 25	KELAUTAN DAN PERIKANAN													
3 25 04	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		808,802	850,000	454,495,000	850,000	454,495,000	850,000	454,495,000	850,000	454,495,000		Dinas Peternakan dan Perikanan
I 1		2 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (ADHB)		7.98	8.45		8.87		9.04		9.04			
3 31	PERINDUSTRIAN													
3 31 02	Perencanaan dan Pembangunan Industri	1 % tersosialisasikannya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)		4.35	52.00	10,685,881,400	78.00	10,610,881,400	100.00	10,460,881,400	100.00	31,757,644,200		Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
I 1		2 % pertumbuhan industri		0.68	0.73		0.74		0.75		0.75			
		3 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan (ADHB)		9.14	9.96		10.24		10.76		10.76			

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bondowoso

1.1.3 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah alat ukur kinerja bagi Pemerintah Propinsi terhadap Kabupaten/Kota yang dilihat dari pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang berhak diperoleh secara minimal oleh setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM merupakan bagian dari urusan wajib yang terdiri dari 6 urusan yaitu Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Sosial. SPM harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggarannya (pasal 18).

SPM adalah kebijakan yang mewajibkan komitmen pemerintah daerah terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang merupakan hak-hak warga negara. Penetapan Indikator SPM dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Sedangkan, penerapan SPM diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Petunjuk teknis yang mengatur tentang operasional dan pelaksanaan setiap indikator SPM masing-masing urusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang membawahi setiap urusan. Berdasarkan kebijakan ini, maka setiap Pemerintah Daerah harus mampu mencapai target setiap indikator SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Laporan SPM sebagai kewajiban tahunan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah berlangsung sejak tahun 2005 yang terdiri dari 6 (enam) urusan yang sebelumnya berjumlah 15 (lima belas) urusan. Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan bahwa indikator dan target SPM wajib diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan. Berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa SPM merupakan laporan wajib tahunan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan ini telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Pembentukan Tim Penerapan SPM.

SPM menjadi prioritas target kinerja utama (Indikator Kinerja Utama) organisasi perangkat daerah (OPD) pemangku SPM. Hal ini makin memantapkan peran SPM sebagai elemen penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah yang harus ditetapkan di dalam dokumen perencanaan. Integrasi ini tidak hanya menjadi pertanda peran penting SPM, tetapi juga membantu memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun laporan tahunan SPM mengingat jika SPM sudah diintegrasikan dalam RPJMD, maka perhitungan data dan hasil kinerja yang dilaporkan dalam berbagai indikator SPM akan menjadi mudah. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM bahwa laporan SPM wajib disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain itu, Pencapaian SPM wajib dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Renja SKPD, RKPD, KUA, PPA, RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

Atas dasar pemikiran di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso bertekad untuk membangun komitmen bersama seluruh jajaran OPD dalam rangka membangun perencanaan pembangunan dengan memprioritaskan pada indikator SPM yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga negara. Salah satu upaya nyata saat ini adalah mengintegrasikan seluruh indikator SPM ke dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Dan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026. Selain itu, laporan wajib setiap triwulan dan tahunan juga secara rutin dan tertib dilaporkan melalui aplikasi eSPM. Dokumen ini adalah Laporan Tahunan SPM Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

BAB II

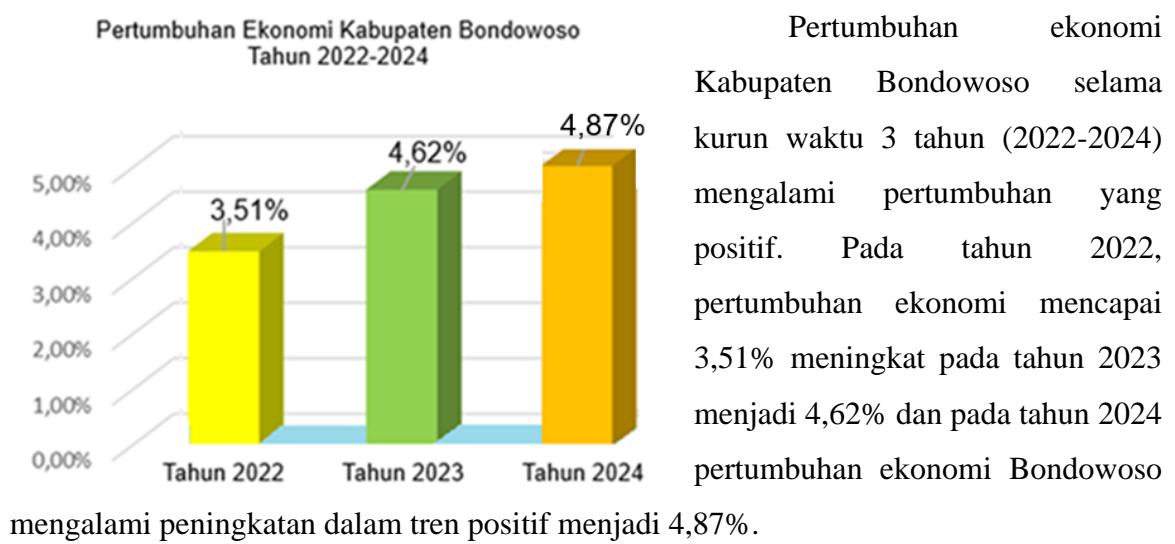
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Copian kinerja pembangunan merupakan unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan/program pembangunan atau mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan ditargetkan oleh pemerintah daerah. Selama kurun waktu 2024, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melaksanakan pengukuran atas capaian kinerja makro daerah yang meliputi 6 indikator kinerja yaitu : pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, Indek Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Kemiskinan, dan Indek Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu yang dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.



Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Bondowoso Tahun 2022-2024

No	Uraian	Laju Pertumbuhan Ekonomi Bondowoso (%)		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	-1,61	2,06	3,54
2	Pertambangan dan Penggalian	5,91	2,02	2,05
3	Industri Pengolahan	6,23	5,02	4,48
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,77	7,02	6,18

No	Uraian	Laju Pertumbuhan Ekonomi Bondowoso (%)		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	-0,77	-0,33	-0,50
6	Konstruksi	6,70	6,00	6,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	6,76	6,42	5,80
8	Transportasi dan Pergudangan	14,09	9,75	5,41
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,99	10,41	6,04
10	Informasi dan Komunikasi	3,09	7,31	6,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,13	4,69	2,77
12	Real Estat	5,25	1,78	1,51
13	Jasa Perusahaan	4,72	6,78	6,52
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-1,53	-1,28	7,55
15	Jasa Pendidikan	1,93	5,96	6,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,36	4,34	5,39
17	Jasa Lainnya	10,75	9,59	7,10
	Pertumbuhan Ekonomi	3,51	4,62	4,87

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,55 persen pada tahun 2024 yang 2 (dua) tahun sebelumnya mengalami kontraksi. Selain itu, pertumbuhan cukup tinggi lainnya pada lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 7,10 persen. Sementara itu, pertumbuhan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi juga tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 6,69 persen.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi selanjutnya adalah lapangan usaha Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 6,52 persen. Lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 6,40 persen.

Perekonomian Bondowoso tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mencapai Rp.15,81 triliun dan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp.26,54 triliyun.

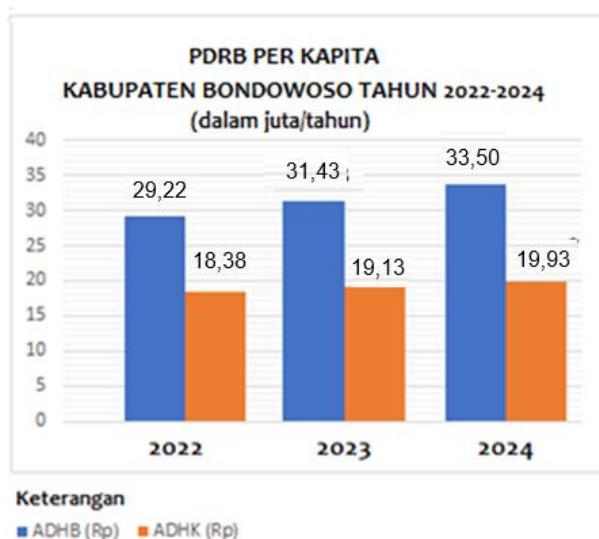
Tabel 2.2
Struktur PDRB Kabupaten Bondowoso menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Berlaku Tahun 2022-2024

No	Uraian	Nilai PDRB (milyar Rp) dan Kontribusi (%)					
		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	6.489,78	28,34	6.906,68	27,88	7.445,84	28,05
2	Pertambangan dan Penggalian	425,65	1,86	453,48	1,83	462,88	1,74
3	Industri Pengolahan	5.788,78	25,28	6.300,31	25,43	6.691,30	25,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,74	0,04	10,59	0,04	11,24	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	16,12	0,07	16,37	0,07	16,35	0,06
6	Konstruksi	2.091,20	9,13	2.282,93	9,22	2.439,95	9,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	3.520,24	15,37	3.880,21	15,66	4.188,10	15,78
8	Transportasi dan Pergudangan	189,64	0,83	224,70	0,91	238,92	0,90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	155,04	0,68	175,92	0,71	190,51	0,72
10	Informasi dan Komunikasi	1.236,89	5,40	1.339,17	5,41	1.437,82	5,42
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	641,28	2,80	693,49	2,80	718,94	2,71
12	Real Estat	259,97	1,14	269,44	1,09	278,47	1,05
13	Jasa Perusahaan	81,73	0,36	89,40	0,36	97,12	0,37
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	702,78	3,07	709,43	2,86	782,30	2,95
15	Jasa Pendidikan	764,93	3,34	834,10	3,37	910,09	3,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	175,56	0,77	187,16	0,76	198,24	0,75
17	Jasa Lainnya	352,51	1,54	399,97	1,61	435,00	1,64
		22.901,86	100	24.773,36	100	26.543,06	100

Struktur PDRB Bondowoso atas dasar harga berlaku tahun 2024 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,05 persen. Selama tiga tahun terakhir, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendominasi struktur PDRB menurut lapangan usaha dengan kontribusi di atas 25 persen. Namun, tren kontribusinya terlihat semakin menurun dari tahun 2022 ke tahun 2023, sedangkan di tahun 2024 terlihat meningkat.

Lapangan usaha lainnya yang memiliki peran dominan antara lain Industri Pengolahan sebesar 25,21 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,78 persen, Konstruksi sebesar 9,19 persen, serta Informasi dan Komunikasi sebesar 5,42. Besaran kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terlihat semakin meningkat selama tiga tahun terakhir. Disamping itu, lapangan usaha Konstruksi dan Informasi dan Komunikasi cenderung konstan. Kontribusi dari lima lapangan usaha yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, serta Informasi dan Komunikasi mencapai 83,65 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024.

2. PDRB perkapita



kualitas hidup dan standar hidup penduduk.

PDRB per kapita Kabupaten Bondowoso terus meningkat seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Bondowoso baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Bondowoso selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami peningkatan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai Rp.33,50 juta. Sedangkan PDRB per kapita Atas dasar harga konstan pada tahun 2024 mencapai angka Rp.19,93 juta/tahun yang mencerminkan tingkat produktivitas penduduk Bondowoso dalam menghasilkan barang dan jasa dalam 1 (satu) tahun.

PDRB per kapita adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per orang di suatu daerah. PDRB per kapita dihitung dengan membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduknya.

PDRB per kapita digunakan untuk mengetahui pendapatan rata-rata per orang di suatu wilayah. Data ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi

3. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan.

Tabel 2.3
Indek Gini Kabupaten Bondowoso 2022-2024

No	Uraian	Th 2022	Th 2023	Th 2024
1	2	3	4	5
1	Gini Rasio	0,365	0,350	0,333

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Tingkat ketimpangan yang diukur dengan Indek Gini sepanjang 3 (tiga) tahun (2022-2024) di Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan dari 0,365 (tahun 2022) menjadi 0,333 pada tahun 2024. Tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di Bondowoso menunjukkan kinerja positif dimana kesenjangan pendapatan semakin menurun meskipun masih dalam kategori ketimpangan “sedang”.

4. Persentase penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan yang digunakan sebagai indikator makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 2.4
Tingkat Kemiskinan Tahun 2022-2024

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2022	13,47	449.760	105,69	1,62	0,33
2023	13,34	494.000	105,13	2,06	0,51
2024	12,60	517.741	99,62	1,51	0,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Bondowoso, 2024

Secara umum, dalam periode 2022-2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 105,69 ribu jiwa, berkurang menjadi 99,62 ribu jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 sebesar 13,47%, menjadi 12,60% pada tahun 2024.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2024 sebesar Rp.517.741,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp.23.741,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,81 persen, bila dibandingkan kondisi tahun 2023 yang sebesar Rp.494.000,00. Peningkatan Garis Kemiskinan ini terjadi diantaranya akibat peningkatan harga diberbagai komoditas, terutama komoditas bahan makanan.

Pada periode 2023-2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan nilai dari 2,06 pada tahun 2023 menjadi 1,51 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekat dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,51 pada tahun 2023 menjadi 0,28 pada 2024 yang menunjukkan persebaran pengeluaran penduduk miskin dibawah garis kemiskinan semakin berkurang.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Dalam kurun waktu setahun terakhir (2023-2024), pengangguran menurun sebesar 2.167 orang dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,52 persen poin menjadi 3,63 persen pada tahun 2024 (sebelumnya 4,15 persen pada tahun 2023). Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur.

Menurunnya TPT menunjukkan nilai kinerja yang positif. Dengan berkurangnya TPT, berkorelasi kepada semakin banyaknya masyarakat yang memiliki akses ke lapangan kerja.. Adapun data ketenagakerjaan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.5
Statistik Ketenagakerjaan
Kabupaten Bondowoso Tahun 2022-2024

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Penduduk Usia Kerja (ribu jiwa)	636,5	629,9	633,1

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
2	Angkatan Kerja (ribu jiwa)	474,9	468,6	475,5
3	Bekerja (ribu jiwa)	454,4	449,2	458,2
4	Pengangguran (ribu jiwa)	20,5	19,4	17,3
5	Bukan Angkatan Kerja (ribu jiwa)	161,6	161,3	157,6
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	4,32	4,15	3,63
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (persen)	74,61	74,39	75,1

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2024

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2024 sebesar 633.110 orang, mengalami peningkatan sekitar 3 ribu orang dibandingkan tahun 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 475,5 ribu orang (75,10 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya).

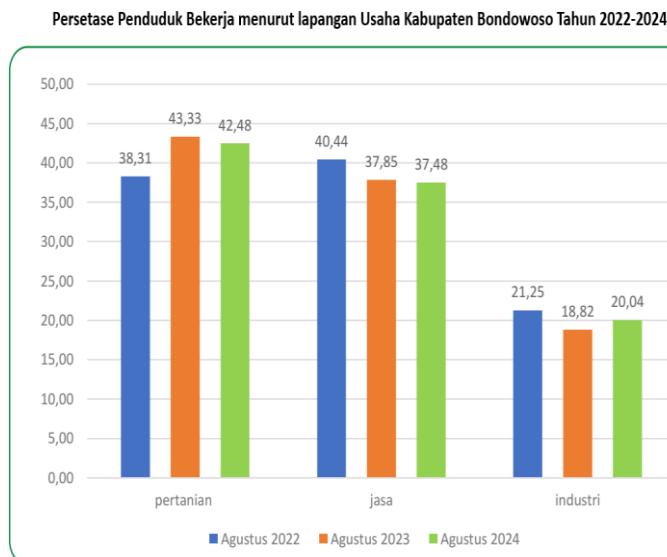
Komposisi angkatan kerja pada tahun 2024 terdiri dari 458,2 ribu orang penduduk yang bekerja dan 17,3 ribu orang pengangguran. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 3,8 ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak 3,2 ribu orang dari tahun sebelumnya (tahun 2023). Sementara itu, apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2023, jumlah angkatan kerja juga mengalami peningkatan sebanyak 6,9 ribu orang. Penduduk bekerja naik sekitar 9 ribu orang dan pengangguran turun sebanyak 2,1 ribu orang

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada tahun 2024 sebesar 75,10 persen, naik sebesar sebesar 0,71 persen dibanding tahun 2023.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, terdapat tiga sektor lapangan pekerjaan utama yaitu Pertanian, manufaktur dan jasa. Lapangan pekerjaan Pertanian meliputi subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Lapangan pekerjaan manufaktur (industri) terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, dan sektor konstruksi. Sedangkan lapangan pekerjaan jasa yang terdiri dari sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi, transportasi dan komunikasi, keuangan serta jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan.

Tabel 2.6
Jumlah penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Pada Agustus 2024 persentase orang yang bekerja di sektor lapangan pekerjaan jasa sebesar 37,48 persen (171.736 jiwa), mengalami penurunan 0,37 persen dibanding Agustus 2023. Persentase orang yang bekerja di sektor lapangan pekerjaan industri pada Agustus 2024 mengalami peningkatan 1,22 persen poin dibanding tahun sebelumnya menjadi 20,04 persen (91.825 jiwa). Sedangkan persentase orang yang bekerja di sektor lapangan pekerjaan pertanian pada Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 0,85 persen poin menjadi 42,48 persen (1954.646 jiwa).



6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM juga menjadi salah satu ukuran untuk mengetahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam emperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso tahun 2024 mencapai 71,22, meningkat 0,66 poin (0,94 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2023, IPM sebesar 70,56). Selama 2022–2024, IPM Kabupaten Bondowoso rata-rata meningkat sebesar 0,93 persen per tahun.

Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan

IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami percepatan, kecuali dimensi umur panjang dan hidup sehat yang mengalami perlambatan.

Tabel 2.7
Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Tahun 2022-2024

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	72,98	73,19	73,31
2	Harapan Lama sekolah (HLS)	13,31	13,32	13,33
3	Rata Lama Sekolah (RLS)	6,22	6,36	6,53
4	Pengeluaran per Kapita (Rp.000,00)	10.851	11.255	11.689

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2024

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,33 tahun atau rata-rata mengalami laju pertumbuhan UHH sebesar 0,23 persen per tahun. Pada tahun 2022, UHH Kabupaten Bondowoso adalah 72,98 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 73,31 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,12 tahun (0,16 persen) dibanding tahun sebelumnya (tahun 2023, UHH sebesar 73,19).

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2024, rata-rata laju pertumbuhan HLS Kabupaten Bondowoso sebesar 0,075 persen per tahun, sementara RLS sebesar 3,82 persen per tahun. RLS tahun 2024 meningkat 0,17 tahun (2,67 persen) dibandingkan tahun 2023.

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Bondowoso mencapai Rp11,689 juta per tahun. Capaian ini meningkat 434 ribu rupiah (3,86 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2023, pengeluaran riil sebesar 11,255 juta).

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Adapun mapping perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan wajib maupun pilihan di Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 8
Perangkat Daerah Pelaksana
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilih

URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pendidikan	Dinas Pendidikan
Kesehatan	Dinas Kesehatan
	RSUD Dr. H. Koesnadi
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga,Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman , Cipta Karya dan Tata Ruang
Pertanahan	
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
Penanaman Modal	
Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perhubungan	Dinas Perhubungan

URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Komunikasi dan Informatika	
Persandian	
Statistik	
Transparansi Dan Partisipasi Publik	
Koperasi, usaha kecil dan menengah	
Perdagangan	
Perindustrian	
Energi Dan Sumber Daya Minera	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Kepemudaan dan Olahraga	
Pariwisata	
Kebudayaan	
Perpustakaan	
Kearsipan	
Kelautan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
Pertanian	
Kehutanan	
Energi Dan Sumber Daya Minera	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Transmigrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Perencanaan keuangan	
Manajemen Keuangan	
Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Makro	
Evaluasi Kinerja Dan Peningkatan Kapasitas Daerah	
Fasilitasi Kepala Daerah, Dprd, Dan Hubungan Antar Lembaga	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
Produk Hukum Daerah	
KKPD	

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2. 9
Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Terhadap LPPD tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	97.36	Dinas Pendidikan	Tidak semua kegiatan ataupun sub kegiatan yang mendukung Standart Pelayanan Minimal (SPM) dapat teranggarkan.
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99.96	Dinas Pendidikan	Tidak Semua sub kegiatan yang mendukung pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dapat teranggarkan.
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94.86	Dinas Pendidikan	Terdapat sub kegiatan yang mendukung pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) tidak teranggarkan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	Dinas Pendidikan	Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah, solusinya berdasarkan SK Bupati Nomor : 188.45/863/430.4.2/2024 tentang Satgas Penanganan Anak Tidak Sekolah kabupaten bondowoso, berkolaborasi antara

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Pemerintah Kabupaten, Bappeda, Dinas Pendidika
2	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0.68	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	62.56	Dinas Kesehatan	adanya kenaikan sasaran sesuai KMK No. HK.01.07/MENKES/140/2024 tentang data penduduk sasaran program pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025, Ibu hamil Abortus sampai Desember 407 ibu hamil, Bayi Baru Lahir Prematur 382 bayi baru lahir, adanya budaya dikab
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	77.08	Dinas Kesehatan	adanya kenaikan sasaran sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/140/2024 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan. Persalinan sampai bulan September di lakukan di Ponkesdes dan Puskesmas Pemba

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	75.35	Dinas Kesehatan	adanya kenaikan sasaran sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/140/2024 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan. Tingginya komplikasi pada neonatus 1210 Bayi Baru Lahir dan adanya persalin
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	97.51	Dinas Kesehatan	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90.71	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100.81	Dinas Kesehatan	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	80.39	Dinas Kesehatan	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 	100	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 	100	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	0	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota 	0	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 	14.24	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	74.62	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan	84.61	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,	Kurangnya pola perilaku masyarakat untuk hidup bersih

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pengolahan air limbah domestik 		Cipta Karya dan Tata Ruang	dan sehat serta keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 	64.25	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	3.43	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	48.14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah dan perlu dilakukan revisi SK Kumuh Kabupaten Bondowoso
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni);	25.27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	50.15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	- Adanya perumahan yang terlantar, adanya perumahan yang tidak di ketahui pengembangnya, Perumahan baru dan Perumahan sedang berjalan.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satuan Polisi Pamong Praja	- Berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Kebutuhan Personil Satpol PP, bahwa jumlah personil belum sesuai kebutuhan, karena rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk harus ada 6 personil, sedangkan kondisi sekarang 2 banding 10.000
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Satuan Polisi Pamong Praja	Karena keterbatasan Anggaran, sehingga pelaksanaan Sidang TIPIRING tidak dapat dilaksanakan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	keterbatasan sarpras, jumlah personil dan anggaran
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	keterbatasan anggaran, kurangnya personil dan terbatasnya sarpras
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	keterbatasan anggaran, kurangnya personil dan terbatasnya sarpras
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Satuan Polisi Pamong Praja	Untuk mengembangkan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) dalam peningkatan RTR (Response Time Rate) maka diperlukan pembentukan POS pembantu untuk menjangkau daerah - daerah terpencil yang dudukung oleh Armada dan perlatan baru serta Personil yang memadai
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10.5	Satuan Polisi Pamong Praja	Untuk mengembangkan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) dalam peningkatan RTR (Response Time Rate) maka diperlukan pembentukan POS pembantu untuk menjangkau daerah - daerah terpencil yang dudukung oleh Armada dan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					perlatan baru serta Personil yang memadai
6	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	30.13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	21.42	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.07	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	5.79	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang	11.55	Dinas Penanaman Modal Pelayanan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).		Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		Percentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota 	76.12	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Percentase ARG pada belanja langsung APBD	45.53	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindugnan Anak, dan Keluarga Berencana	Masih banyak OPD yg belum membuat analisa ARG
		Percentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindugnan Anak, dan Keluarga Berencana	Masih terjadi kekerasan terhadap anak
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	10.52	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindugnan Anak, dan Keluarga Berencana	Masih terjadi kekerasan terhadap perempun

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) 	145.89	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Anggaran dan SDM yang terbatas
		Percentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Tidak ada kegiatan pada TA 2024, Anggaran untuk Program Pertanahan terbatas, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bondowoso tidak jalan serta proses revisi SK Tim GTRA sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Refor
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal. 	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap direistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Tidak ada kegiatan pada TA 2024, Anggaran untuk Program Pertanahan terbatas, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bondowoso tidak jalan serta proses revisi SK Tim GTRA sesuai Peraturan Presiden

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Refor
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Tidak ada kegiatan pada TA 2024, Anggaran untuk Program Pertanahan terbatas, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bondowoso tidak jalan serta proses revisi SK Tim GTRA sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Refor
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Tidak ada kegiatan pada TA 2024, Anggaran untuk Program Pertanahan terbatas, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bondowoso tidak jalan serta proses revisi SK Tim GTRA sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Refor
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	68.21	Dinas Lingkungan Hidup	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	21.33	Dinas Lingkungan Hidup	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU	0	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99.55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	41.44	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Kepemilikan akta kelahiran	97.44	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	53.84	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sudah tidak ada lagi desa tertinggal di kabupaten Bondowoso sejak tahun 2020
		Persentase peningkatan status desa mandiri	10.84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan	Sudah Tercapai dan Ideal

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Keluarga Berencana	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	81.04	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Tidak ada kendala (Prevelensi bagus di atas target tahun 2024)
15	Perhubungan	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	2.37	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Prosentase KB yang tidak terpenuhi lebih kecil dari pada target Tahun 2024 yang menandakan capaiannya bagus
		Rasio konektivitas kabupaten/kota	1	Dinas Perhubungan	Banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi
16	Komunikasi dan Informatika	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0.377	Dinas Perhubungan	
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program	0.68	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota			
17	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	29.77	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	12.86	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Sumber Daya Manusia
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-87.60	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Bondowoso bernilai negatif karena pelaku usaha yang mendaftarkan kegiatan usahanya adalah pelaku usaha dengan nilai rencana investasi yang kecil
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.93	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2.50	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	
		Peningkatan prestasi olahraga &nbs	285	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	
20	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik	60.34	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
		Percentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	60.34	Dinas Komunikasi dan Informatika	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah;	84.80	Dinas Komunikasi dan Informatika	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	93.18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	65.6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tenaga pengelola perpustakaan
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19.47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sumber Daya Manusia (SDM) Kurangnya tenaga pengelola perpustakaan
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	51.74	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kurangnya tenaga pengelola karsipan yang dimiliki oleh daerah (ARSIPARIS)
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	2263.16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kurangnya tenaga pengelola karsipan pada OPD (ARSIPARIS)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP);	112.85	Dinas Peternakan dan Perikanan	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	42.54	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	8.17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	
		Tingkat hunian akomodasi	29.36	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	100	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3,63	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	617.64	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	-4.76	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Terjadi peningkatan penyakit hewan menular 4,76% , terjadi peningkatan kasus penyakit pada unggas maupun ternak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					ruminansia akibat perubahan iklim sepanjang tahun 2024
28	Kehutanan	1 Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2 Pemberdayaan masyarakat di daerah penyanga 3 Pemulihan ekosistem pada Tahura 4 Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	105	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	45.83	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	Sumber Daya Manusia
		Persentase kinerja realisasi pupuk	60.43	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	Kebijakan
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0.65	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	Anggaran
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	0.68	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	Sumber Daya Manusia
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan	100	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	Kebijakan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	Sumber Daya Manusia
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	Kebijakan
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	Kebijakan
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	90	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	Sumber Daya Manusia
32	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Bagian Kesejahteraan Rakyat	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.10
Indikator Kinerja Fungsi Penunjang
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Terhadap LPPD Tahun 2024

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	23.34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Rasio PAD	12.65	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	70.53	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Opini Laporan Keuangan	10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak Pernah Menangani Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Proyek Kontruksi yang dibawa ke Tahun Berikutnya yang ditandatangani pada Kuartal Pertama

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	64.61	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	40.15	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	3.22	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	47.06	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15.22	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	47.42	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
4	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	3.03	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	3.63	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Manajemen Aset	4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	5.94	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	70.68	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- c. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja yang disajikan setelah terdapat penyesuaian dengan Perubahan RKPD 2024 dan KU P-APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	1 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian (ADHB)	4,71%
		2 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (ADHB)	8,45%
		3 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan (ADHB)	9,96%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata	4 Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	1,03%
3	Meningkatnya Usaha Skala Mikro	5 Persentase Usaha Mikro naik kelas	0,05%
4	Meningkatnya Investasi Daerah	6 Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	3,61%
5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi	7 Presentasi kondisi mantap jalan kabupaten dan jalan strategis	71,9 %
		8. Rasio Jaringan Daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan baik	27,86 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	9. Rasio Konektivitas Kabupaten	0,92
7	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	10. Laju Pertumbuhan Penduduk	0,35%
8	Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	11. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,11%
9	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	12. Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7261
10	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	13. Indeks Kualitas Air 14. Indeks Kualitas Udara 15. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	53,69 83,16 63,46
11	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Prasarana Permukiman di Perkotaan dan Pedesaan	16. Presentasi kawasan permukiman kumuh	32,47
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	17. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 18. Indeks SPBE	81,00 % 2,6
13	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	19. Nilai SAKIP 20. Nilai Opini BPK 21. Nilai EKPPD	A WTP 3,226
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	22. Persentase potensi konflik SARA yang ditangani 23. Indek Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	100% 2,6
15	Meningkatnya Derajat Pendidikan	24. Indeks Pendidikan	58,11
16	Meningkatnya Derajat Kesehatan	25. Indeks Kesehatan	72,89
17	Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberdayaan Pemuda	26. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 27. Status Kabupaten Layak Anak 28. Status Kabupaten Layak Pemuda	92 Madya Pratama

2.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026.

Kerangka pengukuran kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, dimana dalam penarikan kesimpulan terhadap kategori capaian kinerja mengacu skala ordinal dari Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun cara pengukuran kinerja diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3. Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator sasaran strategis dikategorikan sesuai dengan rentang capaian, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.12
Kategori Penilaian Capaian Kinerja

Rentang Capaian	Kategori
Capaian $\geq 100\%$	Memuaskan
$85 \leq \text{Capaian} < 100$	Sangat Berhasil
$70 \leq \text{Capaian} < 85$	Berhasil
$55 \leq \text{Capaian} < 70$	Cukup Berhasil
Capaian < 55	Kurang Berhasil

Adapun capaian indikator sasaran strategis yang sudah ditetapkan berdasarkan target kinerja tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perubahan) Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET/CAPAIAN 2024			KATEGORI	TARGET AKHIR RPD (2026)	CAPAIAN RPD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
<i>Tujuan 1 : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi</i>									
1	Persentase Pertumbuhan PDRB (ADHK)	3,51%	4,62%	4,20%	4,87%	115,95%	Memuaskan	4,82	101%
2	Persentase Pertumbuhan PDRB (ADHB)	8,79%	8,17%	5,92%	7,14%	120,61%	Memuaskan	6,28	114%
3	Nilai PDRB per Kapita (ADHK)	18,38	19	16,95	20	117,70%	Memuaskan	17,25	116%
4	Nilai PDRB per Kapita (ADHB)	29,22	31	31,79	34	105,38%	Memuaskan	33,57	100%
	Indeks Gini	0,365	0,350	0,36	0,333	107,50%	Memuaskan	0,36	105%
<i>Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan</i>									
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian	4,59%	6,42%	4,71%	7,81%	165,82%	Memuaskan	4,86%	161%
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	12,61%	8,84%	8,45%	6,21%	73,49%	Berhasil	7,14%	87%
3	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan	12,23%	10,23%	9,96%	7,93%	79,62%	Berhasil	7,54%	105%
<i>Sasaran 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata</i>									
4	Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	1,06%	1,11%	1,03%	1,13%	109,71%	Memuaskan	1,62%	70%
5	Persentase Usaha Mikro naik kelas	0,05%	0,057%	0,05%	0,06%	120,00%	Memuaskan	0,05%	120,00%
<i>Sasaran 3 : Meningkatnya Usaha Skala Mikro</i>									
6	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	-0,78%	203,66%	3,61%	-0,87%	-24,10%	Kurang Berhasil	4,02%	-21,64%
<i>Sasaran 4 : Meningkatnya Investasi Daerah</i>									
7	Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten dan jalan strategis	-	66,98	71,90	64,25	89,36%	Sangat Berhasil	77,63	82,76%
8	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan baik	-	27,86	27,86	24,22	86,93%	Sangat Berhasil	27,86	86,93%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET/CAPAIAN 2024			KATEGORI	TARGET AKHIR RPD (2026)	CAPAIAN RPD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Sasaran 6 : Meningkatnya Konektivitas Wilayah									
9	Rasio Konektivitas Kabupaten	–	0,92	0,92	0,9	97,83	Memuaskan	1	90,00%
Tujuan 2 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan									
	Percentase Tingkat Kemiskinan	13,47%	13,34%	12,50%	12,60%	99,20%	Sangat Berhasil	11,50%	90,43%
Sasaran 7 : Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk									
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,37%	0,37%	0,35%	0,30%	114,29%	Memuaskan	0,35%	114,29%
Sasaran 8 : Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka									
11	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	4,32%	4,15%	4,11%	3,63%	111,68%	Memuaskan	3,91%	107,16%
Sasaran 9 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat									
12	Indeks Desa Membangun	0,7251	0,7377	0,7261	0,7457	102,70%	Memuaskan	0,7281	102,42%
Tujuan 3 : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup									
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,97	66,76	67,48	67,65	100,25%	Memuaskan	67,74	99,87%
Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan									
13	Indeks Kualitas Air	55,33	48,46	53,69	53,69	100,00%	Memuaskan	53,59	100,19%
14	Indeks Kualitas Udara	86,70	86,75	83,16	83,16	100,00%	Memuaskan	83,06	100,12%
15	Indeks Tutupan Lahan	59,57	61,21	63,46	63,46	100,00%	Memuaskan	62,54	101,47%
Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman									
16	Persentase kawasan permukiman kumuh	0,33%	0,16%	32,47	48,14	51,74%	Kurang Berhasil	0%	-48%
Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik									
	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,01)	66,30	69,00	79,05	114,57%	Memuaskan	67,5	117,11%
Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik									
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,06	87,09	81,00	87,57	108,11%	Memuaskan	82	106,79%
18	Indek SPBE	2,23 (Cukup)	2,90 (Baik)	2,6 (Baik)	3,86 (Sangat baik)	148,46%	Memuaskan	2,8 (Baik)	137,86%
Sasaran 13 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah									
19	Nilai SAKIP	BB (74,02)	BB	A (80,01)	BB (74,15)	92,68%	Sangat Berhasil	A (80,01)	92,68%
20	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP*	100%	Memuaskan	WTP	100%
21	Nilai EKPPD	3,22	2,626	3,226	2,626*	81,40%	Berhasil	3,22	81,40%
Sasaran 14 : Terwujudnya ketetraman dan ketertiban masyarakat									
22	Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	Memuaskan	100%	100%
23	Indek Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	2,55	2,6	2,6	0,62%	0,24%	Kurang Berhasil	2,8	22,14%
Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia									
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,31	70,56	68,35	71,22	104,20%	Memuaskan	69,21	102,90%
Sasaran 15 : Meningkatnya Derajat Pendidikan									
24	Indeks Pendidikan	57,71	58,20	58,11	58,79	101,17%	Memuaskan	55,3	106,31%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET/CAPAIAN 2024			KATEGORI	TARGET AKHIR RPD (2026)	CAPAIAN RPD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
<i>Sasaran 16 : Meningkatnya Derajat Kesehatan</i>									
25	Indeks Kesehatan	72,75	73,23	72,89	82,02	112,53%	Memuaskan	73,54	111,53%
<i>Sasaran 17 : Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan pemuda</i>									
26	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,10	91,01	92	91,17	99,10%	Sangat Berhasil	94	96,99%
27	Status Kabupaten Layak Anak	Madya	Madya	Madya	Madya	100,00%	Memuaskan	Nindya	85,71%
28	Status Kabupaten Layak Pemuda	-	Pratama	Pratama	Pratama	100,00%	Memuaskan	Pratama	100,00%

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bondowoso Dalam Angka Tahun 2025 dan Perangkat Daerah terkait

2.3.3 Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

2.3.3.1 Capaian Kinerja Tujuan 1 Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi (*perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, permasalahan, solusi perbaikan, dan benchmark dengan kabupaten sekitar, propinsi dan nasional*)

Kinerja Tujuan Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi diwujudkan dengan menggunakan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB (ADHK), Persentase Pertumbuhan PDRB (ADHB), Nilai PDRB per Kapita (ADHK), Nilai PDRB per Kapita (ADHB) dan Indeks Gini. Pencapaian Tujuan tersebut didukung oleh 5 (lima) Sasaran yaitu :

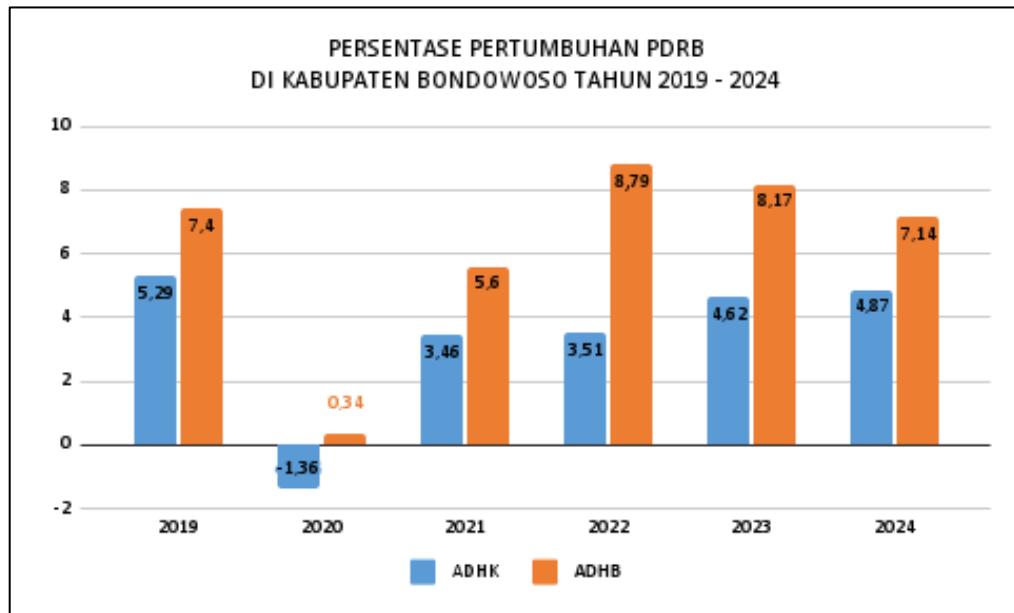
1. Sasaran 1: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan
2. Sasaran 2: Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata
3. Sasaran 3: Meningkatnya Usaha Skala Mikro
4. Sasaran 4: Meningkatnya Investasi Daerah
5. Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi
6. Sasaran 6: Meningkatnya Konektivitas Wilayah

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
Tahun 2024

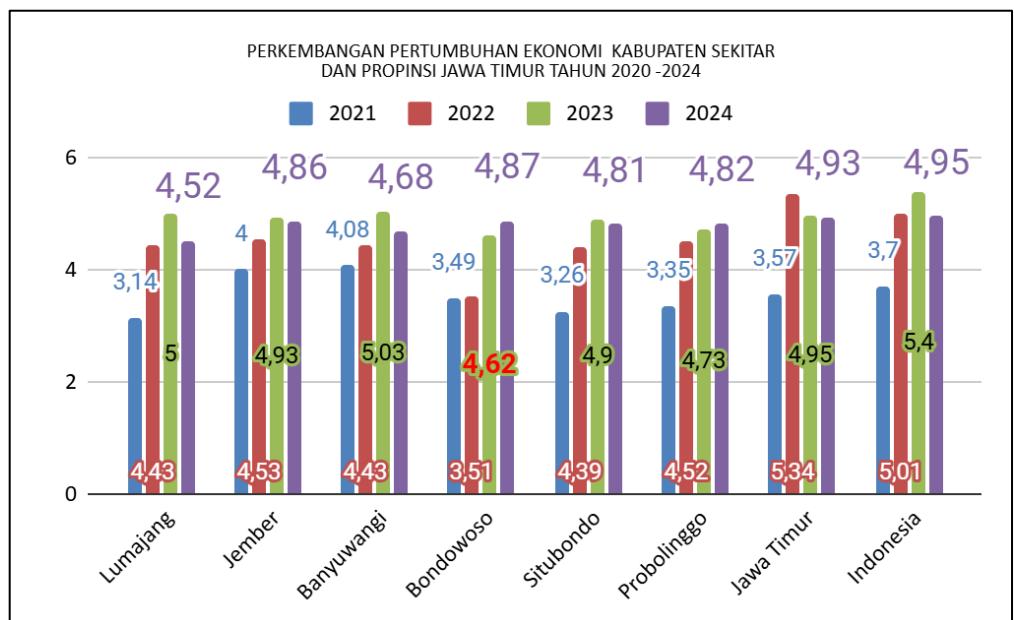
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET/CAPAIAN 2024			KATEGORI	TARGET AKHIR RPD (2026)	CAPAIAN RPD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
<i>Tujuan 1 : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi</i>									
	Persentase Pertumbuhan PDRB (ADHK)	3,51%	4,62%	4,20%	4,87%	115,95%	Memuaskan	4,82	101%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET/CAPAIAN 2024			KATEGORI	TARGET AKHIR RPD (2026)	CAPAIAN RPD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
	Persentase Pertumbuhan PDRB (ADHB)	8,79%	8,17%	5,92%	7,14%	120,61%	Memuaskan	6,28	114%
	Nilai PDRB per Kapita (ADHK)	18,38	19	16,95	20	117,70%	Memuaskan	17,25	116%
	Nilai PDRB per Kapita (ADHB)	29,22	31	31,79	34	105,38%	Memuaskan	33,57	100%
	Indeks Gini	0,365	0,350	0,36	0,333	107,50%	Memuaskan	0,36	105%
Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan									
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian	4,59%	6,42%	4,71%	7,81%	165,82%	Memuaskan	4,86%	161%
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	12,61%	8,84%	8,45%	6,21%	73,49%	Berhasil	7,14%	87%
3	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan	12,23%	10,23%	9,96%	7,93%	79,62%	Berhasil	7,54%	105%
Sasaran 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata									
4	Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	1,06%	1,11%	1,03%	1,13%	109,71%	Memuaskan	1,62%	70%
Sasaran 3 : Meningkatnya Usaha Skala Mikro									
5	Persentase Usaha Mikro naik kelas	0,05%	0,057%	0,05%	0,06%	120,00%	Memuaskan	0,05%	120,00%
Sasaran 4 : Meningkatnya Investasi Daerah									
6	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	-0,78%	203,66%	3,61%	-0,87%	-24,10%	Kurang Berhasil	4,02%	-21,64%
Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi									
7	Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten dan jalan strategis	-	66,98	71,90	64,25	89,36%	Sangat Berhasil	77,63	82,76%
8	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan baik	-	27,86	27,86	24,22	86,93%	Sangat Berhasil	27,86	86,93
Sasaran 6 : Meningkatnya Konektivitas Wilayah									
9	Rasio Konektivitas Kabupaten	-	0,92	0,92	1	108,70%	Memuaskan	1	100

Upaya Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada Tahun 2024 dengan berbagai program kebijakan mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, namun masih perlu didorong untuk dapat sejajar dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten sekitar. Pertumbuhan PDRB ADHB di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2024 mengalami kenaikan tipis yaitu sebesar 0,25% jika dibandingkan dengan PDRB ADHB pada tahun 2023.



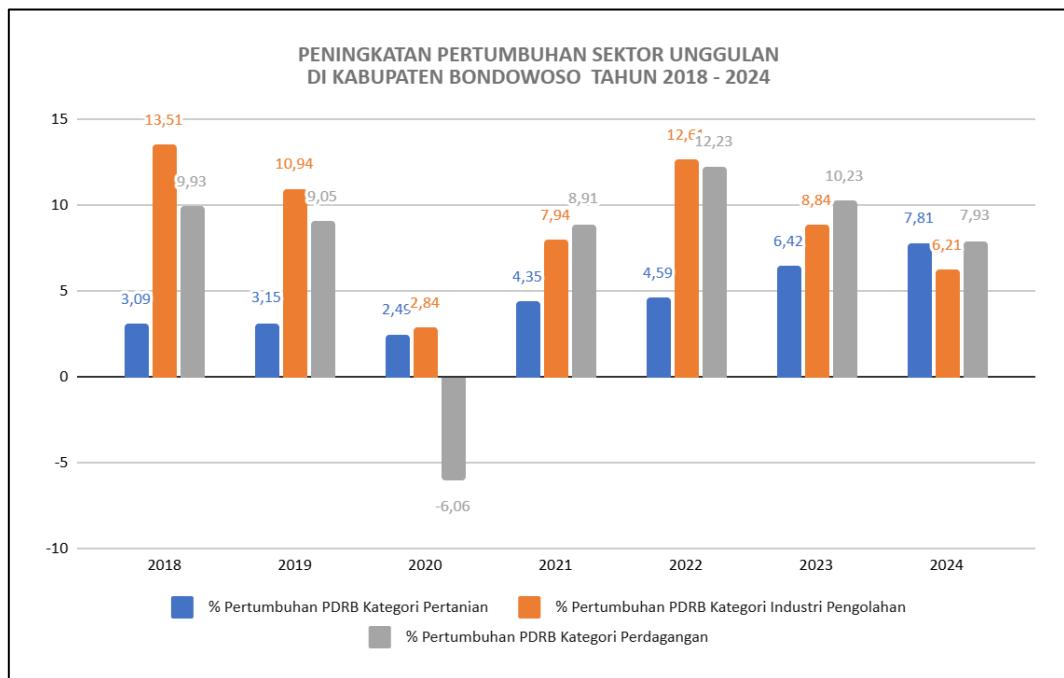
Sumber : Kabupaten Bondowoso dalam Angka 2025



Sumber : Propinsi Jawa Timur dalam Angka 2025

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bondowoso cukup baik apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah sekitar, propinsi jawa timur maupun nasional. Dimana di wilayah Jawa Timur pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi berkisar 1,67% (Kab. Bojonegoro) s/d 5,76% (Kota Surabaya), Bondowoso mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87%.

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dengan indikator kinerja utama persentase pertumbuhan PDRB kategori pertanian dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 4,71% terealisasi 7,81% atau dengan capaian sebesar 115,95% dari target. Capaian Tahun 2024 ini menyumbangkan 101% dari target akhir RPD Tahun 2026.



Pada Tahun 2024 PDRB di Kabupaten Bondowoso mengalami kenaikan cukup besar pada sektor pertanian yaitu sebesar 1,39 %, namun pada sektor industri pengolahan dan perdagangan justru mengalami penurunan.

Permasalahan

1. Bantuan untuk Tanaman Pangan, Holtikultura dan Kopi dropping bantuan tidak tepat waktu
2. Terjadinya anomali cuaca

Solusi

1. Menyesuaikan dengan dropping dan menyiapkan lahan untuk tanam.
2. Memberikan penyuluhan dan pendampingan tentang penggunaan varietas yang sesuai dengan keadaan cuaca, Penerapan Praktik Pertanian Berkelanjutan: Praktik pertanian berkelanjutan seperti konservasi tanah dan air, rotasi tanaman, serta penggunaan pupuk organik dapat membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu.

Sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB (ADHB) Kategori Pertanian, didukung oleh 4 program pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan , yaitu terdiri dari :

1. Program penyedian dan pengembangan sarana pertanian
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
3. Program penyuluhan pertanian
4. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Masyarakat Veteriner
5. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Di Kabupaten Bondowoso sektor industri pengolahan menjadi sektor terbesar ketiga yang memberikan kontribusi pada PDRB Kabupaten Bondowoso. Industri pengolahan non migas mencatatkan pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2024. Ini menandakan aktivitas di sektor industri masih bergeliat di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dengan indikator kinerja utama persentase pertumbuhan PDRB ADHB kategori industri pengolahan dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 8,45% terealisasi 6,21% atau dengan capaian sebesar 73,49% dari target, dengan kategori berhasil. Capaian Tahun 2024 ini menyumbangkan 87% dari target akhir RPD Tahun 2026.

Permasalahan

1. Masih banyak produk Sentra Industri Kecil Kabupaten Bondowoso yang perlu ditingkatkan kualitasnya serta dipenuhi syarat-syarat standar produksi dan pemasarannya.

Solusi

1. Diselenggarakan pengembangan Sentra Industri Kecil dengan fokus kegiatan pada pelatihan teknis, fasilitasi sertifikasi dan pemberian stimulan sarana produksi

Sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB (ADHB) Kategori Industri Pengolahan, didukung oleh 1 program pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu terdiri dari :

1. Perencanaan dan Pembangunan Industri

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dengan indikator kinerja utama persentase pertumbuhan PDRB kategori

perdagangan dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 9,96% terealisasi 7,93% atau dengan capaian sebesar 79,62% dari target, dengan kategori berhasil. Capaian Tahun 2024 ini menyumbangkan 105% dari target akhir RPD Tahun 2026.

Sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB (ADHB) kategori perdagangan, didukung oleh 4 program pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu terdiri dari :

1. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
2. Perencanaan dan Pembangunan Industri
3. Pengembangan ekspor
4. Standarisasi dan perlindungan konsumen
5. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dengan indikator kinerja utama persentase kontribusi kategori pariwisata terhadap PDRB dari target yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar 1,03% terealisasi sebesar 1,13% atau dengan capaian kinerja sebesar 109,71%, dengan kategori memuaskan.

Branding Ijen Geopark menjadi salah satu pemanfaatan potensi pariwisata mancanegara dan nusantara berkunjung ke Kabupaten Bondowoso. Potensi pariwisata Ijen Geopark diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokalnya yang sejalan dengan Tujuan dari pendirian geopark yaitu pembangunan perekonomian, pendidikan dan konservasi alam yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dan daerah tujuan wisata dalam usaha menyelamatkan dan memberi peluang untuk menjadi lebih menarik melalui konservasi lingkungan, budaya, ekonomi dan sosial.

Selain itu salah satu program pengembangan kepariwisataan yang saat ini sedang digalakkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso adalah pengembangan desa wisata dan desa budaya untuk pemulihian perekonomian masyarakat agar mampu mendongkrak kembali peningkatan PDRB Sektor Pariwisata.

Sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB dari kategori Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata, didukung oleh 3 program pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, yaitu terdiri dari :

1. Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata
2. Pemasaran Pariwisata

3. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Permasalahan

Permasalahan pada aspek pariwisata yang penting untuk ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah:

1. Munculnya brand Kabupaten Bondowoso Ijen Geopark Unesco Global Geopark yang masih memerlukan dukungan kuat dari stakeholder terkait
2. masih kurangnya infrastruktur dasar pariwisata
3. masih kurangnya Visibilitas dan amenitas Pariwisata
4. Belum Optimalnya Promosi Pariwisata
5. Rendahnya kualitas SDM pariwisata yang berkompeten
6. masih rendahnya kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata di destinasi wisata
7. belum optimalnya paket wisata
8. belum ada inovasi pembelian tiket wisata secara online

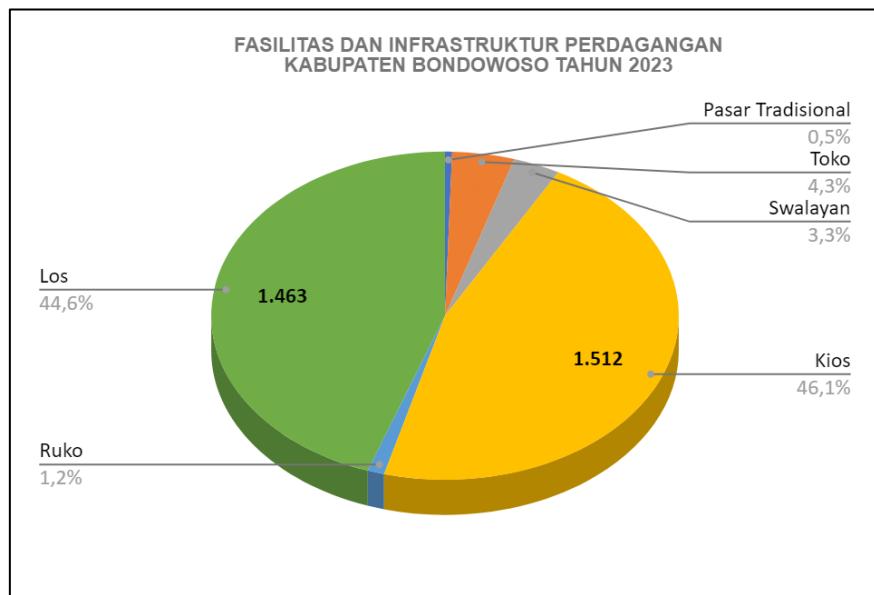
Solusi

- 1 Penguatan citra dan daya saing pariwisata secara internasional melalui City Branding Ijen Geopark perlu dipromosikan secara terintegrasi dan didukung oleh seluruh stakeholder terkait dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi kabupaten Bondowoso sektor pariwisata.
- 2 meningkatkan infrastruktur dasar pariwisata melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar di daerah menuju destinasi wisata
- 3 meningkatkan visibilitas dan amenitas Pariwisata
- 4 meningkatkan promosi Pariwisata dengan menggunakan media elektronik maupun media massa berbasis online dan offline
- 5 melakukan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pariwisata untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang berkompeten
- 6 meningkatkan kemitraan dengan para pelaku usaha pariwisata
- 7 Perlu dibuat paket wisata yang menarik agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan
- 8 perlu dilakukan inovasi pembelian tiket secara online

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya usaha skala mikro dengan indikator kinerja utama persentase usaha mikro naik kelas dari target yang ditetapkan

Tahun 2024 sebesar 0,05% terealisasi sebesar 0,05% atau dengan capaian kinerja sebesar 120%, dengan kategori memuaskan. Capaian Tahun 2024 ini telah menyumbangkan 120% dari target akhir RPD Tahun 2026.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada UMKM, seperti dukungan pembiayaan KUR, BPUM, dan Subsidi Bunga Non KUR guna memastikan UMKM dapat naik kelas.



Sumber : Dinas Koperindag Tahun 2024

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Usaha Skala Mikro didukung dengan 6 (enam) program pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yaitu:

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
3. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
4. Pengembangan UMKM

Permasalahan

Sebagian besar Usaha Mikro belum bisa untuk menjadi pelaku usaha yang mandiri dari segi kelembagaan, SDM pelaku usaha serta permodalan dan juga kurang dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dunia usaha yang berkembang sangat cepat

Solusi

Peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui : penguatan kelembagaan, pendataan UM, fasilitasi kemitraan, fasilitasi akses permodalan, pemasaran, kemudahan perizinan serta pelatihan-pelatihan ketrampilan SDM pelaku usaha dan Peningkatan pengembangan Usaha Mikro melalui pemberian

dukungan sarana prasarana usaha

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya investasi daerah dengan indikator kinerja utama persentase pertumbuhan investasi daerah dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 3,61% terealisasi -0,87% atau tercapai -24,10% dengan kategori kurang berhasil.

Untuk meningkatkan investasi, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerbitkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam prosedur pengurusan perizinan.

Dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerapkan layanan perizinan secara online yang terintegrasi, terpadu dengan paradigma perizinan berbasis resiko yaitu aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang berlaku secara nasional. Dengan sistem ini pelaku usaha dapat melakukan permohonan setiap waktu, dimana saja selama internet tersedia, serta dapat diterbitkan secara realtime. Sedangkan untuk perizinan non usaha dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Perijinan Online (SIAPO).

Sesuai Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, maka pada Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso memiliki inovasi SIJEMPOL (Sistem Ijin Jemput Bola Secara Mobile), dimana petugas pelayanan perizinan mendatangi tempat-tempat strategis (pasar, alun-alun, pusat pertokoan, dll) untuk melayani pemohon yang akan mengurus perizinan.

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah didukung dengan 3 (tiga) program pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yaitu :

1. Program Promosi Penanaman Modal
2. Program Pelayanan Penanaman Modal
3. Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal

Permasalahan

1. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bondowoso
2. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM.

Solusi

- 1 Mempromosikan potensi dan peluang investasi kepada investor

2 Mengadakan sosialisasi serta pendampingan dalam penyampaian LKPM

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang ekonomi dengan indikator kinerja persentase kondisi mantap jalan kabupaten dan jalan strategis dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 71,90% terealisasi sebesar 64,25% atau dengan capaian sebesar 89,36% dari target. Capaian tersebut masuk dalam kategori sangat berhasil. Capaian Tahun 2024 ini telah menyumbangkan 82,76% dari target akhir RPD Tahun 2026.

Sedangkan indikator kinerja rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan baik dengan target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 27,86% terealisasi 24,22% atau dengan capaian sebesar 86,93% dari target. Capaian tersebut masuk dalam kategori sangat berhasil. Capaian Tahun 2024 ini telah menyumbangkan 86,93% dari target target akhir RPD Tahun 2026.

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Sumber Daya Air dengan Indikator Kinerja Utama Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, didukung 4 program pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Permasalahan

1. Program penyelenggaran jalan belum mencapai target kinerja yang direncanaan karena beberapa lokasi tidak terlaksana dan beberapa lokasi masuk dalam KDP
2. Peralatan Berat sebagai penunjang kinerja melebihi masa umur ekonomisnya
3. Belum meratanya Sumber Daya Manusia
4. Anomali iklim menyebabkan curah hujan yang sangat tinggi di satu titik tertentu yang berdampak pada terjadinya bencana alam (longsor, banjir, angin puting beling)

Solusi

1. Melakukan penganggaran kembali pada Tahun 2025
2. Meningkatkan pemeliharaan untuk menekan laju kerusakan

3. Peremajaan secara bertahap dan optimalisasi peralatan yang ada saat ini.
4. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso secara rutin .
5. Melakukan penyiapan perencanaan konstruksi bangunan pengendali banjir dan bekerja sama dengan OPD lain dan Pihak ketiga dalam upaya meminimalisir kerugian akibat bencana.

2.3.3.2 Capaian Kinerja Tujuan 2 Menurunnya Tingkat Kemiskinan (perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, permasalahan, solusi perbaikan, dan benchmark dengan kabupaten sekitar, propinsi dan nasional)

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Tujuan Menurunnya Tingkat Kemiskinan
Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET/CAPAIAN 2024			KATEGORI	TARGET AKHIR RPD (2026)	CAPAIAN RPD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Tujuan 2 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan									
	<i>Persentase Tingkat Kemiskinan</i>	13,47%	13,34%	12,50%	12,60%	99,20%	<i>Sangat Berhasil</i>	11,50%	90,43%
Sasaran 7 : Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk									
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,37%	0,37%	0,35%	0,30%	114,29%	<i>Memuaskan</i>	0,35%	114,29%
Sasaran 8 : Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka									
11	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	4,32%	4,15%	4,11%	3,63%	111,68%	<i>Memuaskan</i>	3,91%	107,16%
Sasaran 9 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat									

Kinerja Tujuan Menurunnya Tingkat Kemiskinan diwujudkan dengan menggunakan indikator kinerja Persentase Tingkat Kemiskinan. Pencapaian Tujuan tersebut didukung oleh 3 (tiga) Sasaran yaitu :

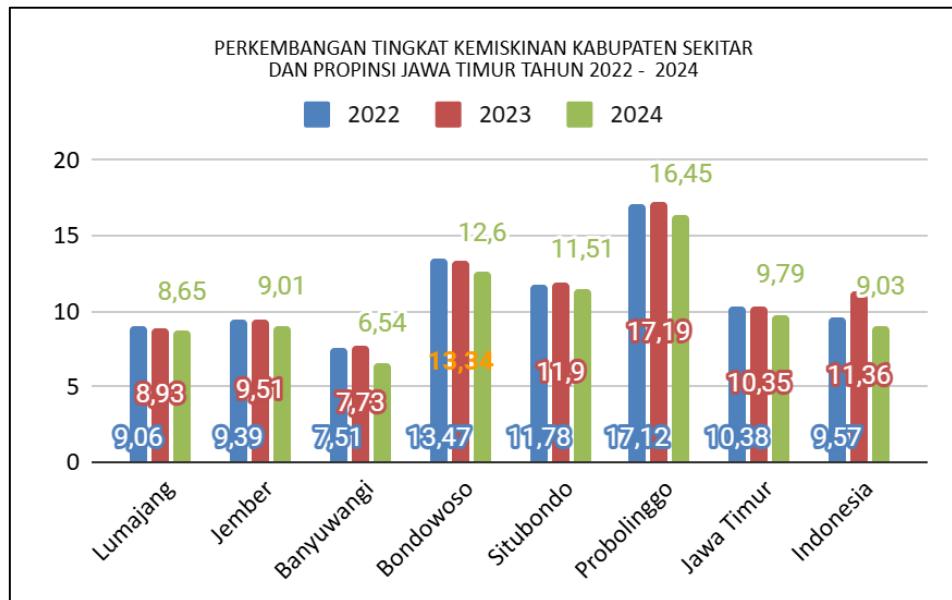
1. Sasaran 7: Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
2. Sasaran 8: Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Sasaran 9: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menurunkan angka kemiskinan di Bondowoso cukup baik dengan tren yang terus menurun dan mampu kembali pada keadaan sebelum pandemic covid-19. Menekan angka laju kemiskinan

adalah prioritas pada tahun 2024 dengan hasil menunjukkan angka 12,60% dengan capaian kinerja sebesar 99,20% kategori capaian kinerja sangat berhasil.



Sumber : Kabupaten Bondowoso dalam Angka 2025



Sumber : Propinsi Jawa Timur dalam Angka 2025

Capaian kinerja sasaran strategis terkendalinya pertumbuhan penduduk dengan indikator kinerja utama laju pertumbuhan penduduk dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 0,35% terealisasi 0,30% atau dengan capaian sebesar 114,29% dari target. Capaian tersebut masuk dalam kategori memuaskan. Capaian Tahun 2024 ini telah menyumbangkan 114,29% dari target target akhir RPD Tahun 2026. Salah satu kebijakan yang mendukung keberhasilan penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk adalah Peningkatan Pendewasaan Usia Perkawinan dan Total Fertility Rate.

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu.

Pertumbuhan Penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Secara umum faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah faktor alami yaitu kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas) serta faktor non alami yaitu migrasi (imigrasi dan emigrasi). Hal - hal yang mendukung keberhasilan pencapaian tersebut diantaranya adalah menurunnya Angka TFR, Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan KB dan Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga.

Unmetneed merupakan presentase wanita yang saat ini tidak menggunakan metode kontrasepsi dan tidak ingin anak lagi atau menunda kelahiran, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. Realisasi di Kabupaten Bondowoso sudah cukup rendah, hal ini berarti kualitas pelayanan KB sudah berjalan secara maksimal. Beberapa hal yang mendukung berhasilnya capaian tersebut adalah tingkat pengetahuan SDM masyarakat, dukungan suami dan keluarga serta kualitas pelayanan dan sosial budaya.

ASFR merupakan angka kelahiran tertentu di usia 15 - 19 tahun. di kabupaten Bondowoso capaiannya sudah cukup berhasil. Hal - hal yang mendukung diantaranya adalah faktor pendidikan dan pengetahuan wanita.

Permasalahan

1. Pendewasaan Usia Perkawinan dan Penggunaan KB MKJP harus terus ditingkatkan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas menuju generasi emas di masa yang akan datang
2. Masih banyak pernikahan usia dibawah 20 tahun yang terjadi baik secara formal maupun non formal(sirri)
3. Masih banyak akseptor yang lebih memilih menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (pil, suntik,kondom)
4. Masih ada beberapa masyarakat SDM rendah yang memberikan info negatif tentang pelayanan KB
5. Masih tingginya pernikahan di usia muda dapat menyebabkan meningkatnya angka ASFR 15 - 19

Strategi/Solusi

Advokasi dan KIE tentang Pendewasaan Usia perkawinan dengan usia ideal menikah untuk Perempuan 21 tahun dan laki - laki 25 tahun perlu terus digaungkan terutama dikalangan remaja. Juga Advokasi kepada PUS dan Akseptor KB untuk

menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang perlu terus ditingkatkan. Salah satu upaya dengan menjalin koordinasi

Capaian kinerja Sasaran Strategis Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk didukung dengan 3 program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pemberdayaan Sosial

Capaian kinerja sasaran strategis Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka dengan indikator kinerja utama Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 4,11% terealisasi 3,63% atau dengan capaian sebesar 111,68% dari target. Capaian tersebut masuk dalam kategori memuaskan. Capaian Tahun 2024 ini telah menyumbangkan 107,16% dari target target akhir RPD Tahun 2026.

Menurunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) karena adanya pelaksanaan pelatihan kerja untuk meningkatkan kemampuan SDM / skill masyarakat, penyebarluasan informasi lowongan kerja melalui media, kerjasama / MOU dengan perusahaan-perusahaan dalam / luar daerah, penyuluhan ketenagakerjaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta jaminan sosial tenaga kerja menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang terserap di dunia kerja sehingga.

Capaian kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Indikator Kinerja Utama Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didukung dengan 3 program pada Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Penempatan Tenaga Kerja
3. Hubungan Industrial

Permasalahan

Keterampilan/keahlian/kompetensi SDM pencari kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja

Solusi

Peningkatan keterampilan / keahlian SDM pencari kerja melalui pelatihan kerja dan sesuai kebutuhan pasar kerja

2.3.3.3 Capaian Kinerja Tujuan 3 Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup (perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, permasalahan, solusi perbaikan, dan benchmark dengan kabupaten sekitar, propinsi dan nasional)

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Tujuan
Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET/CAPAIAN 2024			KATEGORI	TARGET AKHIR RPD (2026)	CAPAIAN RPD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
<i>Tujuan 3 : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup</i>									
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,97	66,76	67,48	67,65	100,25%	Memuaskan	67,74	99,87%
<i>Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Air,Udara dan Tutupan Lahan</i>									
13	Indeks Kualitas Air	55,33	48,46	53,69	53,69	100,00%	Memuaskan	53,59	100,19%
14	Indeks Kualitas Udara	86,70	86,75	83,16	83,16	100,00%	Memuaskan	83,06	100,12%
15	Indeks Tutupan Lahan	59,57	61,21	63,46	63,46	100,00%	Memuaskan	62,54	101,47%
<i>Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman</i>									
16	Persentase kawasan permukiman kumuh	0,33%	0,16%	32,47	48,14	51,74%	Kurang Berhasil	0%	-48%

Kinerja Tujuan Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup diwujudkan dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pencapaian Tujuan tersebut didukung oleh 2 (dua) Sasaran yaitu:

1. Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Air,Udara dan Tutupan Lahan
2. Sasaran 11: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 67,48% terealisasi 67,65% atau dengan capaian sebesar 100,25% dari target. Capaian tersebut masuk dalam kategori memuaskan. Capaian Tahun 2024 ini telah menyumbangkan 99,87% dari target target akhir RPD Tahun 2026.

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan indikator kinerja utama indek kualitas air dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 53,69% terealisasi 53,69% atau dengan capaian sebesar 100% dari

target. Capaian tersebut masuk dalam kategori memuaskan. Capaian Tahun 2024 ini telah menyumbangkan 99,63% dari target target akhir RPD Tahun 2026.

Sedangkan Indikator kinerja utama indeks kualitas tutupan lahan dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 63,46% terealisasi 63,46% atau dengan capaian sebesar 100% dari target. Capaian tersebut masuk dalam kategori memuaskan. Capaian Tahun 2024 ini telah menyumbangkan 99,84% dari target target akhir RPD Tahun 2026.

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan didukung dengan 4 (empat) program pada Dinas Lingkungan Hidup yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
4. Program Pembinaan dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
6. Program pengelolaan Persampahan.

Permasalahan

1. Nilai capaian IKLH sangat tergantung pada ketersediaan data-data pendukung perhitungan dari setiap komponennya baik IKA, IKU dan IKL. IKA dan IKU memerlukan lebih banyak data dan penentuan titik lokasi pemantauan yang representatif wilayah Kabupaten. sedangkan IKL lebih dituntut pada tingkat kepiawaian SDM yang menangani dalam membaca dan membentuk data dari citra satelit menjadi data perhitungan yang diharapkan
2. Dari 10 data hasil pemantauan 5 titik lokasi sampling air sungai Sampean beberapa parameter memang masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan. Ditambah ada kesalahan teknis memasukan data dari 4 data propinsi yang masuk ke perhitungan data IKA Kabupaten Bondowoso. Koordinasi lebih lanjut terkait penginputan data dengan propinsi sudah dilakukan.;
3. Sebaran lokasi sampling masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten, relatif masih terkonsentrasi di pusat kota

Solusi

1. Menambah jumlah titik pantau dan meningkatkan kualitas SDM agar lebih lihai dalam mengolah data menjadi nilai indeks yang diharapkan
2. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perijinan, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik .
3. Menyiapkan anggaran APBD untuk kegiatan pengendalian pencemaran udara, melakukan pemantauan kualitas udara dengan menggunakan APBD dan meningkatkan pengawasan ke sumber pencemar, Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam program pengendalian pencemaran udara.
4. Mempertahankan dan meningkatkan tutupan hutan melalui pengawasan dan intervensi kebijakan alih fungsi lahan, merumuskan inovasi program penanaman serta mengarahkan program penanaman pada area berfungsi lindung untuk mempertahankan serta meningkatkan luas belukar pada fungsi lindung, Mempertahankan upaya pengelolaan RTH dan tutupan vegetasi relevan lainnya yang telah ada, perlu adanya kebijakan dan peraturan dalam implementasi kegiatan yang mendukung pengendalian kerusakan lahan, perlu meningkatkan upaya publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dengan indikator kinerja persentase kawasan permukiman kumuh dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 32,47% terealisasi 48,14% atau dengan capaian sebesar 51,74% dari target. Capaian tersebut masuk dalam kategori kurang berhasil.

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman didukung dengan 3 program pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta karya dan Tata Ruang yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
2. Program Pembangunan Perumahan
3. Program Perumahan dan Kawasan permukiman Kumuh

Permasalahan

1. Munculnya Kawasan kumuh baru di desa/kelurahan kawasan kecamatan;

2. Ketersediaan rumah layak huni terbatas;

Solusi

1. Memetakan kawasan kumuh dan merencanakan penanganannya;
2. Membagi perencanaan peningkatan kualitas kawasan agar segera tuntas;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat;
4. Fasilitasi pengembangan perumahan

2.3.3.4 Capaian Kinerja Tujuan 4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, permasalahan, solusi perbaikan, dan benchmark dengan kabupaten sekitar, propinsi dan nasional)

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Tujuan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET/CAPAIAN 2024		KATEGORI		TARGET AKHIR RPD (2026)	CAPAIAN RPD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
<i>Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik</i>									
	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,01)	66,30	69,00	79,05	114,57%	Memuaskan	67,5	117,11%
<i>Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</i>									
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,06	87,09	81,00	87,57	108,11%	Memuaskan	82	106,79%
18	Indek SPBE	2,23 (Cukup)	2,90 (Baik)	2,6 (Baik)	3,86 (Sangat baik)	148,46%	Memuaskan	2,8 (Baik)	137,86%
<i>Sasaran 13 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah</i>									
19	Nilai SAKIP	BB (74,02)	BB	A (80,01)	BB (74,15)	92,68%	Sangat Berhasil	A (80,01)	92,68%
20	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP*	100%	Memuaskan	WTP	100%
21	Nilai EKPPD	3,22	2,626	3,226	2,626*	81,40%	Berhasil	3,22	81,40%
<i>Sasaran 14 : Terwujudnya ketetralaman dan ketertiban masyarakat</i>									
22	Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	Memuaskan	100%	100%
23	Indek Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	2,55	2,6	2,6	0,62%	0,24%	Kurang Berhasil	2,8	22,14%

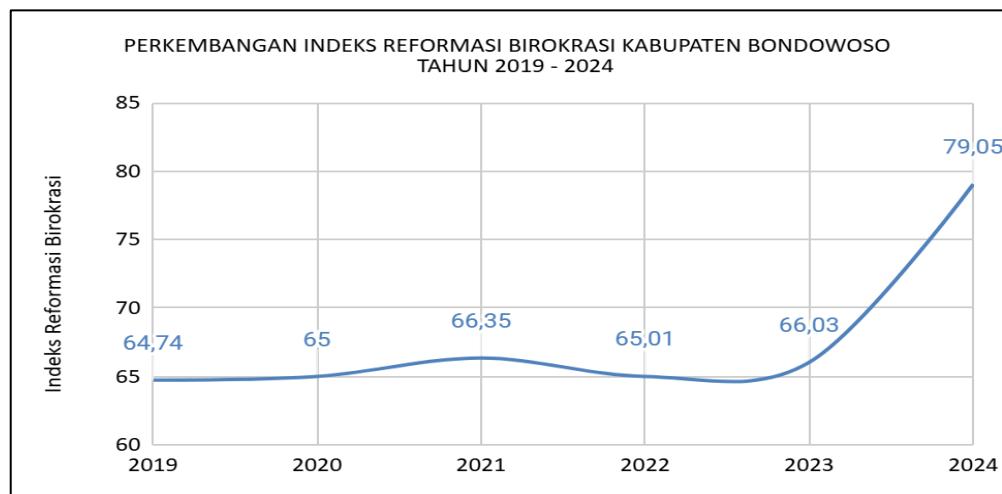
Kinerja Tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Pencapaian Tujuan tersebut didukung oleh 3 (tiga) Sasaran yaitu:

Sasaran 12: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

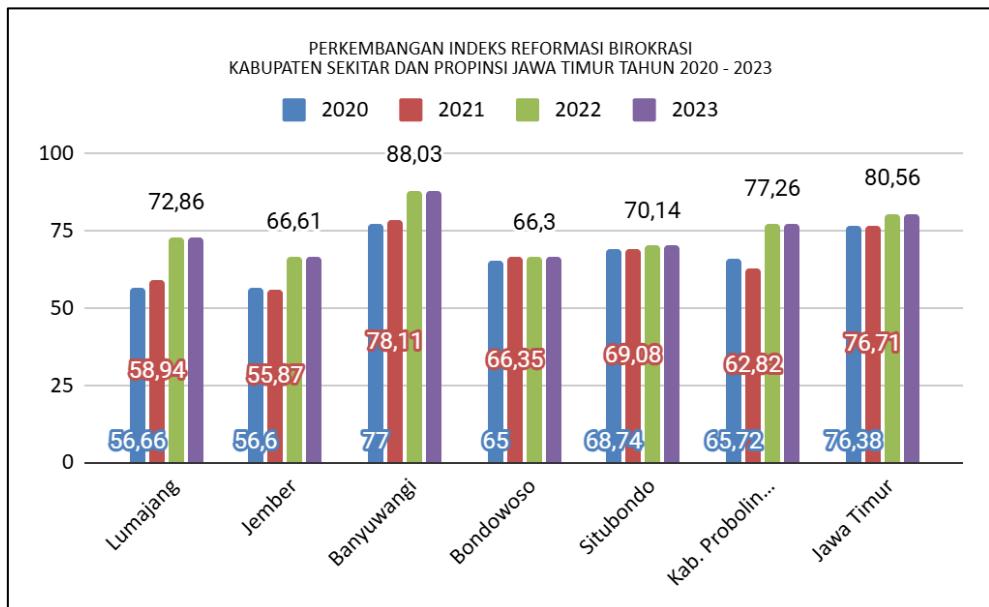
Sasaran 13: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Sasaran 14: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Kinerja tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik tercapai dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 sebesar 79,05. Capaian tersebut mengalami kenaikan sangat signifikan jika dibandingkan capaian tahun 2023, dimana pada tahun 2023 indeks RB masih mendapatkan nilai indeks sebesar 66,30 namun di tahun 2024 indeks RB masih mendapatkan nilai indeks sebesar 79,05. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bondowoso mengalami pasang surut dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024,



Sumber : Laporan Hasil Evaluasi RB Kemenpan Tahun 2019 - 2024



Sumber : Biro Organisasi Propinsi Jawa Timur Tahun 2020 - 2023

Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bondowoso didorong oleh naiknya beberapa indeks komposit (indeks gabungan dari beberapa variabel atau indikator yang digunakan untuk mengukur indeks RB), diantara indeks komposit yang mengalami kenaikan antara lain : Indeks SPBE, Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks Reformasi Hukum, Tingkat Digitalisasi Arsip, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Indeks Berakhlek, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), dan Indeks Pelayanan Publik. Meskipun begitu masih ada beberapa indeks komposit yang masih belum memenuhi nilai minimal “Baik” yaitu : Indeks Sistem Merit, Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Pembangunan Zona Integritas di unit kerja.

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 81,00 tercapai 87,57 atau tercapai 108,11% dengan kategori memuaskan. Capaian Tahun 2024 ini telah menyumbangkan 106,79% dari target akhir RPD Tahun 2024.

Tujuan Reformasi Birokrasi sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara.

Birokrasi seperti itu diharapkan akan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah. Tujuan Reformasi Birokrasi di atas ialah dalam rangka mengejar visi Reformasi Birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan kelas dunia'.

Selama kurun waktu tiga tahun, penilaian SAKIP Kabupaten Bondowoso masih berada pada kategori BB dengan besaran nilai 74,02 pada tahun 2022, 74,77 pada tahun 2023 dan 74,15 pada tahun 2024. Tingkat capaian kinerja nilai SAKIP pada tahun 2024 mencapai 92,68% dengan kategori sangat berhasil.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa nilai sebesar 74,15 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun pelaporan keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan tahap audit. Berikutnya berdasarkan opini hasil audit dan pemeriksaan yang dilakukan, diberikan penilaian. Sedangkan dalam penilaian Laporan Keuangan Daerah (LKD) pengelolaan anggaran tahun 2017-2023, Pemerintah Kabupaten mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tingkat capaian kinerja penilaian Opini BPK pada tahun 2023 mencapai 100,00%. Persentase capaian indikator tersebut dengan kategori capaian kinerja memuaskan.

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah didukung dengan 8 program yaitu:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pendaftaran Penduduk
3. Pencatatan Sipil
4. Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan
5. Pengelolaan Aplikasi Informatika
6. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
7. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
8. Perekonomian dan Pembangunan
9. Penyelenggaraan Pengawasan
10. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
11. Pengelolaan Arsip
12. Kepegawaian daerah
13. Pengembangan Sumber Daya manusia
14. Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah
15. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Permasalahan (terkait Nilai Opini BPK atas LKPD)

- 1) Perencanaan dalam pengelolaan keuangan belum optimal;
- 2) Tertib administrasi dan disiplin anggaran belum dilaksanakan secara optimal;
- 3) Belum terdatanya aset kabupaten secara valid;
- 4) Belum sempurnanya perhitungan asas manfaat penggunaan aset.
- 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di OPD belum optimal;

Solusi Permasalahan (terkait Nilai Opini BPK atas LKPD)

- 1) Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan;
- 2) Menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK tahun sebelumnya;
- 3) Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- 4) Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;
- 5) Peningkatan kualitas laporan keuangan;
- 6) Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 7) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yaitu melalui aplikasi Sistem;
- 8) Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Sistem Informasi Daerah (SIMDA) Keuangan dan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yang dikembangkan BPKP.

Permasalahan (terkait Nilai SAKIP)

Dalam perolehan nilai SAKIP terdapat beberapa kendala diantaranya:

1. Perencanaan kinerja pada level pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi kriteria perencanaan kinerja yang berkualitas, karena masih ditemukan indikator kinerja yang kurang relevan dan cukup untuk mengukur kinerja yang ditetapkan dan juga penetapan target kinerja yang ada belum semuanya menggambarkan progress perbaikan pencapaian kinerja;
2. Walaupun telah dilakukan perubahan pada Renstra perangkat daerah periode 2024 - 2026, namun pada sebagian perangkat daerah masih belum sepenuhnya merumuskan kinerja strategis yang berorientasi hasil/outcome dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya relevan mengukur ketercapaian kinerja yang dimiliki;
3. Penjenjangan kinerja yang dimiliki di level pemerintah daerah dan perangkat daerah belum sepenuhnya disusun berdasarkan kerangka berpikir logis dan hubungan antar level kinerja belum sepenuhnya berdasarkan critical success factor (CSF) atas pencapaian kinerja;
4. Pengidentifikasiannya crosscutting yang ada belum sepenuhnya menggambarkan pengintegrasian kinerja/sharing outcome antar perangkat daerah untuk mempengaruhi kinerja strategis daerah sehingga belum terlihat secara utuh kolaborasi perencanaan perangkat daerah untuk mengawal perencanaan kinerja pemerintah daerah;

5. Penyempurnaan perencanaan kinerja daerah tidak diikuti perbaikan pada pengumpulan data kinerja, hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja belum sepenuhnya memiliki rumusan formulasi perhitungan yang jelas sehingga dapat menyebabkan data kinerja yang dimiliki belum dapat dikatakan andal;
6. Sistem pengukuran kinerja yang dibuat baru dapat mengukur kinerja individu pegawai, yaitu aplikasi sipijar. akan tetapi aplikasi sipijar belum mewadahi pengukuran kinerja organisasi secara keseluruhan baik kinerja level kabupaten maupun perangkat daerah;
7. Kinerja individu yang tertuang pada sasaran kinerja pegawai (SKP) belum sepenuhnya menunjang pencapaian kinerja organisasi/perangkat daerah. hal ini dapat dilihat pada penyusunan matriks peran hasil yang menggambarkan hubungan kinerja individu dan kinerja organisasi/perangkat daerah tidak saling mempengaruhi.
8. laporan kinerja pada level pemerintah daerah yang tertuang pada LPPD belum sepenuhnya mengungkapkan analisis pencapaian kinerja, khususnya terkait dengan upaya perbaikan kedepan yang digunakan sebagai masukan perbaikan perencanaan ke depan;
9. Pada sebagian laporan kinerja perangkat daerah belum sepenuhnya mengungkapkan informasi pencapaian kinerja yang diperjanjikan secara detail dan analisis yang disusun belum sepenuhnya memberikan gambaran terkait dengan keberhasilan/kegagalan terhadap seluruh kinerja yang ditetapkan;
10. Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan menyasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan SAKIP
11. Pemanfaatan Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan. Hal ini dikarenakan masih terdapat perangkat daerah yang belum optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal.

Solusi (terkait Nilai SAKIP)

1. Mendorong perencanaan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya, yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 - 2026 untuk lebih berkualitas, yaitu dengan menetapkan indikator kinerja yang relevan dan cukup

mengukur kinerja dan menetapkan target kinerja yang dapat memberikan gambaran progress perbaikan pencapaian kinerja tiap tahunnya;

2. Memastikan kembali seluruh Renstra perangkat daerah perubahan sudah merumuskan kinerja strategis yang berorientasi hasil dan indikator kinerja yang ditetapkan harus relevan mengukur ketercapaian kinerja yang dimiliki;
3. Memastikan kembali penjenjangan kinerja pada level pemerintah daerah dan perangkat daerah telah disusun berdasarkan kerangka logis dan juga memastikan hubungan antar level kinerja berdasarkan critical success factor atas pencapaian kinerja diatasnya;
4. Melakukan pengidentifikasi kembali pada crosscutting yang dimiliki dengan memastikan adanya pengintegrasian kinerja/sharing outcome antar perangkat daerah untuk mempengaruhi kinerja strategis daerah sehingga tercipta perencanaan kinerja yang kolaboratif;
5. Mendorong adanya perbaikan pengumpulan data kinerja berdasarkan perencanaan kinerja pemerintah daerah yang terbaru dengan memastikan seluruh indikator kinerja yang ada memiliki rumusan formulasi perhitungan yang jelas sehingga data kinerja yang menunjang indikator kinerja tersebut dapat dikatakan andal.
6. Melakukan penyempurnaan pada aplikasi SAPIJAR agar tidak hanya dapat mengukur kinerja individu, namun juga dapat mengakomodir pengukuran kinerja level kabupaten hingga level perangkat daerah;
7. Memastikan kembali perumusan kinerja individu setiap pegawai benar-benar terkait dengan kinerja organisasi dengan cara memastikan matriks peran hasil yang disusun dapat menggambarkan keterkaitan kinerja individu dengan kinerja organisasi/perangkat daerah;
8. Memastikan LPPD kedepannya untuk dapat mengungkapkan analisis pencapaian kinerja, khususnya terkait dengan upaya perbaikan kedepan yang digunakan sebagai masukan perbaikan perencanaan ke depan;
9. Memastikan kembali sebagian laporan kinerja perangkat daerah kedepannya untuk dapat mengungkapkan informasi pencapaian kinerja yang diperjanjikan secara detail sekaligus memberikan analisis terkait dengan keberhasilan/kegagalan terhadap seluruh kinerja yang ditetapkan;
10. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan

dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistik dan menggambarkan peningkatan kinerja;

11. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memastikan laporan tersebut berisi temuan dan rekomendasi yang detail dan langsung menjawab akar permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dalam pengimplementasian SAKIP;
12. Mendorong pelaksanaan monitoring secara berkala terhadap rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas yang diberikan kepada perangkat daerah guna memastikan optimalisasi tindak lanjut yang dilakukan perangkat daerah.

Capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja utama persentase potensi konflik sosial yang ditangani dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan kategori memuaskan,. Capaian Tahun 2024 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir RPD Tahun 2026.

Selama tahun 2024 dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah Kabupaten Bondowoso, Badan kesatuan Bangsa dan Politik senantiasa meredam kejadian yang berpotensi menimbulkan konflik sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif, namun demikian kewaspadaan diperlukan untuk menjaga situasi dengan dilakukannya pemantauan diwilayah Kabupaten Bondowoso, gesekan-gesekan antar golongan dan antar pendukung yang dapat menimbulkan potensi konflik sosial dimasyarakat sehingga dapat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi di Wilayah Kabupaten Bondowoso.

Permasalahan yang dapat menimbulkan konflik SARA di tahun 2024 yakni salah satunya adalah kejadian pada Toko Suzana, dimana kertas foto copy yang sudah tidak terpakai yang dibelakangnya ada tulisan arab (Lafal Al Quran) oleh karyawan dari toko tersebut dipergunakan untuk Nota Pembelian. Untuk mencegah gejolak dari masyarakat Bakesbangpol bersama dengan FKUB dan Kepolisian melakukan pemanggilan terhadap pemilik toko dan karyawannya. Sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat Pasal 9 Ayat 2 maka Peran FKUB sendiri dalam moderasi beragam untuk memelihara dan mengembangkan kerukunan umat

beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari hasil pemanggilan menurut keterangan karyawan toko tersebut tidak mengetahui kalau kertas tersebut ada lafal Al Quran dan tidak ada unsur kesengajaan hanya kelalaian, untuk pemeriksaan lebih lanjut diselesaikan oleh pihak kepolisian.

Upaya pencegahan terhadap potensi konflik SARA melalui pendekatan kultural dan peningkatan pemahaman keagamaan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama, serta membina hubungan harmonis dan menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan wilayah, sehingga tidak timbul konflik sosial maupun konflik SARA selama tahun 2019-2024.

Permasalahan

Permasalahan yang masih diperkirakan muncul di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan isu SARA dan isu sosial perlu antisipasi sedini mungkin. Misalnya :

- 1) Heterogennya masyarakat Kota Bondowoso sehingga rawan terjadi gesekan dimasyarakat yang dapat menyebabkan potensi konflik SARA
- 2) Adanya unjuk rasa yang dapat memicu konflik Sosial
- 3) Masih adanya Penyalahgunaan Penggunaan Narkoba yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini
- 4) Kerukunan dan toleransi masyarakat yang perlu ditingkatkan
- 5) Banyaknya ormas yang tidak aktif namun legalitas dari ormas tersebut banyak yang terlewat masa aktifnya atau kadaluarsa (Badan Hukum atau SKT) Sehingga legitimasinya meragukan

Solusi

- 1) Permasalahan isu SARA dan isu sosial perlu antisipasi sedini mungkin. Adapun upaya yang dilakukan dengan melalui dialog, pertemuan FKUB dan FPK, pemantauan dan pengamanan wilayah, sosialisasi maupun pembinaan sehingga tercipta suasana berwawasan kebangsaan demi menjaga stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa, Dilakukan Pemantauan dan Pengamanan Wilayah Secara Kontinyu bersinergi dengan instansi terkait sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif dalam pelaksanaan ajang pesta Demokrasi;
- 2) Meningkatkan jalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menekan gesekan-gesekan yang berpotensi konflik
- 3) Melakukan Pemantauan sebagai upaya meningkatkan kenyamanan diwilayah Kabupaten Bondowoso (Waspada adanya ATHG)

- 4) Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini untuk mencegah penggunaan narkoba dan pemberian sosialisasi
- 5) Meningkatkan toleransi, hormat – menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa
- 6) Melakukan himbauan kepada ormas supaya diaktifkan kembali legalitasnya dan diberdayakan agar apabila nanti ada bantuan dari pemerintah maka sudah siap, himbauan yang dilakukan dapat melalui pembinaan atau kunjungan ke kantor ormas

Capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja utama indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 2,6 terealisasi sebesar 0,62 dengan capaian 23,85% dengan kategori kurang berhasil. Capaian Tahun 2024 ini telah menyumbangkan 22,14% dari target akhir RPD Tahun 2024.

Perencanaan yang matang dan manajemen risiko merupakan ujung tombak dari keberhasilan kegiatan sehingga diperlukan peningkatan kualitas perencanaan dan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan sampai dengan sub kegiatan. Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dari dukungan kegiatan dari APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2024 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

Faktor-faktor yang berikut berkontribusi pada keberhasilan capaian kinerja BPBD Kabupaten Bondowoso tahun 2024 dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Bondowoso:

- 1 Adanya peraturan perundang – undangan yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- 2 Adanya kajian risiko bencana yang memetakan potensi bencana di Kabupaten Bondowoso;
- 3 Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan penanggulangan bencana;
- 4 Tersedianya peralatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di Kabupaten Bondowoso;
- 5 Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui program pemerintah daerah dan pusat;
- 6 Peningkatan kompetensi Tim reaksi cepat;

7 Adanya dukungan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Salah satu penyebab semakin parahnya dampak bencana adalah lemahnya strategi mitigasi bencana yang melibatkan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi, sehingga penting untuk mengubah pola pikir masyarakat menjadi masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Usaha ini bisa dimulai dengan mengidentifikasi potensi bencana. Setelah itu, perlu mengetahui langkah awal yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi, ketika, dan setelah bencana terjadi. Hal ini berpeluang besar membantu penyelamatan dan perlindungan diri. Salah satu langkah dalam meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana adalah pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca bencana.

Capaian kinerja Sasaran Strategis meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat dengan indikator kinerja utama persentase ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana didukung dengan 2 program yaitu :

- a. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- b. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- c. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Penanggulangan Bencana

Permasalahan

- a. Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi;
- b. Masih rendahnya pemahaman serta peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam manajemen bencana yang berdampak terhadap rendahnya kesiapsiagaan pada saat pra-bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- c. Luasnya Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Bondowoso; d. Minimnya sarana dan prasarana kebencanaan dalam menunjang kinerja penanggulangan bencana;

- d. Terjadinya perubahan rencana penanganan dikarenakan cuaca yang tidak mendukung.

Solusi

- Optimalisasi program penanggulangan bencana sesuai penanganan kejadian bencana;
- Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bagi korban bencana;
- Koordinasi yang baik antara bidang terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan penanganan kejadian bencana agar tetap dalam kondisi baik;
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap target dan realisasi indikator kinerja

2.3.3.5 Capaian Kinerja Tujuan 5 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, permasalahan, solusi perbaikan, dan benchmark dengan kabupaten sekitar, propinsi dan nasional)

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Tujuan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2024

<i>Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia</i>								
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,31	70,56	68,35	71,22	104,20%	Memuaskan	69,21 102,90%
<i>Sasaran 15 : Meningkatnya Derajat Pendidikan</i>								
24	Indeks Pendidikan	57,71	58,20	58,11	58,79	101,17%	Memuaskan	55,3 106,31%
<i>Sasaran 16 : Meningkatnya Derajat Kesehatan</i>								
25	Indeks Kesehatan	72,75	73,23	72,89	82,02	112,53%	Memuaskan	73,54 111,53%
<i>Sasaran 17 : Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan pemuda</i>								
26	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,10	91,01	92	91,17	99,10%	Sangat Berhasil	94 96,99%
27	Status Kabupaten Layak Anak	Madya	Madya	Madya	Madya	100,00%	Memuaskan	Nindya 85,71%
28	Status Kabupaten Layak Pemuda	-	Pratama	Pratama	Pratama	100%	Memuaskan	Pratama 100%
<i>Sumber : Badan Pusat Statistik, Bondowoso Dalam Angka Tahun 2025 dan Perangkat Daerah terkait</i>								

Kinerja Tujuan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia diwujudkan dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pencapaian Tujuan tersebut didukung oleh 3 (tiga) Sasaran yaitu :

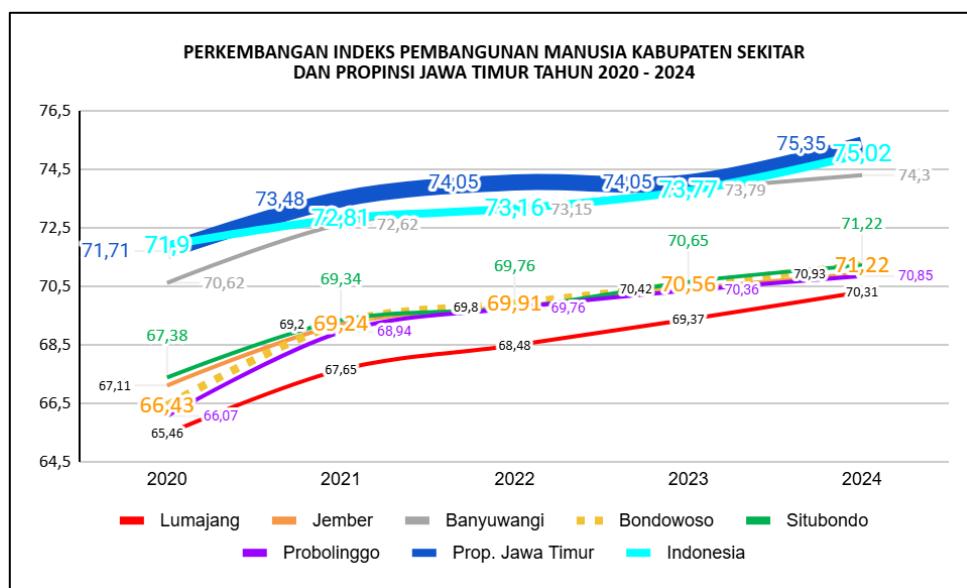
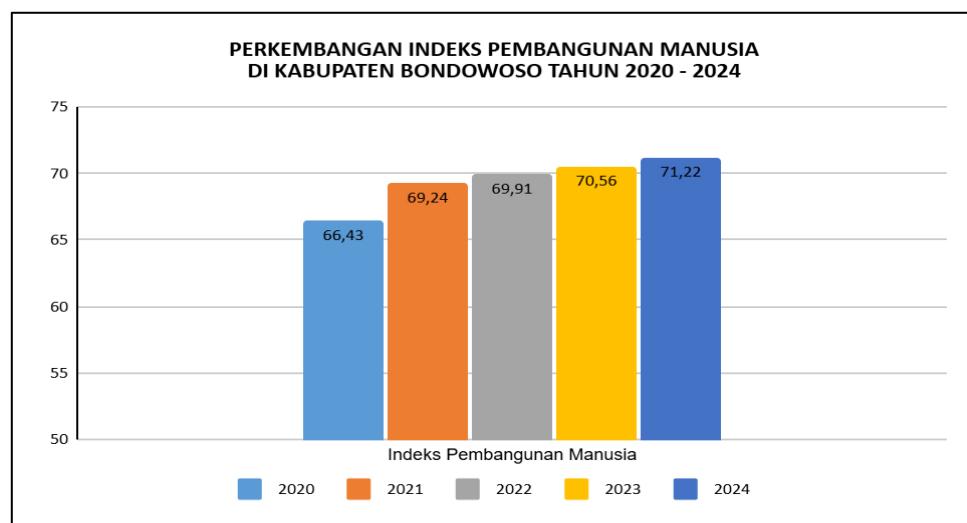
Sasaran 15: Meningkatnya Derajat Pendidikan

Sasaran 16: Meningkatnya Derajat Kesehatan

Sasaran 17: Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan pemuda

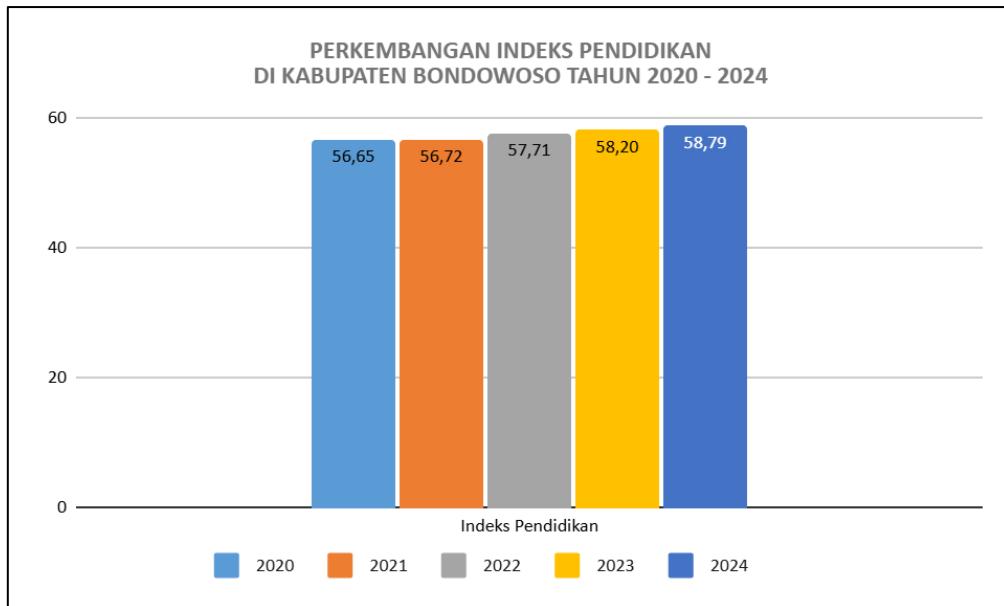
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak

IPM Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan dari 66,59% pada tahun 2021, tahun 2022 mencapai 67,31%, dan tahun 2023 mencapai 70,56%. Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 3 tahun Masyarakat Bondowoso mengalami peningkatan kualitas taraf hidup. Pandemi covid-19 tidak menghambat peningkatan kinerja IPM di Kabupaten Bondowoso.



Sumber : Propinsi Jawa Timur dalam Angka 2025

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya derajat pendidikan dengan indikator kinerja utama indeks pendidikan dari target dari target 58,11 terealisasi sebesar 58,79 atau tercapai 101,17% dari target, dengan kategori memuaskan, menyumbangkan 98,67% dari target akhir RPD tahun 2024.



Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2023

Indeks Pendidikan adalah salah satu indikator komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung peningkatan indeks pendidikan.

Perkembangan indeks pendidikan dari tahun ke tahun semakin meningkat, artinya masyarakat sudah mulai menyadari akan pentingnya pendidikan. Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah populasi yang di gunakan adalah penduduk usia 25 tahun ke atas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia lebih dari 25 tahun keatas masih dalam proses sekolah. indikator ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan, dimana rata-rata lama sekolah diidentifikasi sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Intervensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dalam mendukung capaian Rata-rata Lama Sekolah di lakukan melalui kegiatan peningkatan Akses dan layanan pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah serta pemberian Program Indonesia

Pintar (PIP) bagi anak yang tidak mampu dengan tujuan agar tidak mudah Drop Out (DO).

Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mendukung capaian Rata-rata Lama Sekolah melakukan kebijakan pengembangan pendidikan keaksaraan, kesetaraan dengan melaksanakan bimbingan dan orientasi teknis bagi tutor pendidikan keaksaraan dan terlaksananya ujian nasional paket A, paket B, dan Paket C dengan sasaran penduduk usia 25 – 45 tahun yang tidak pernah atau belum menyelesaikan pendidikannya. Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya derajat pendidikan dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Pendidikan didukung dengan 1 program yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Permasalahan

1. Pemulihan pasca covid-19 yang mengakibatkan masih mengakibatkan jumlah siswa yang bersekolah relative rendah. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan Sosialisasi guna peningkatan jumlah siswa yang bersekolah.
2. Berkurangnya anggaran akibat pandemi covid-19. Solusi : memaksimalkan sisa anggaran untuk kegiatan peningkatan pendidikan di Kabupaten Bondowoso.
3. Masih terdapat angka Drop Out (DO) peserta didik pada tingkat pendidikan dasar. Untuk mengurangi angka DO dilakukan evaluasi dan monitoring serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait (stakeholder).
4. Belum seluruhnya lembaga sekolah memiliki gedung Perpustakaan, Laboratorium dan Ruang Penunjang Lainnya. Untuk memenuhi kekurangan dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana pendidikan dengan mengusulkan melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN.
5. Masih terdapat gedung sekolah rusak berat dan rusak sedang, sehingga dapat dilakukan rehabilitasi melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.
6. Belum terdistribusinya guru secara merata di wilayah Kabupaten Bondowoso yang diakibatkan untuk Kabupaten Bondowoso masih kekurangan guru yang signifikan sehingga masih banyak kelas yang diisi oleh tenaga sukarelawan, untuk melakukan pemerataan diupayakan penataan kembali mengacu pada hasil school mapping dan melalui Data pokok pendidikan (DAPODIK).
7. Penyediaan Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar bagi keluarga tidak mampu

8. Optimalisasi penggunaan Bantuan operasional sekolah (BOS)
9. Meningkatkan kerjasama dengan dunia Usaha dan Dunia Industri
10. Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
11. Peningkatan Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan dengan indikator kinerja utama indeks kesehatan dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 72,89 terealisasi 82,02 atau tercapai 112,53% dengan kategori memuaskan.

Sasaran strategis di atas didukung dengan 4 program pada Dinas Kesehatan, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Indeks Kesehatan Kabupaten Bondowoso setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Meski begitu, kenaikan yang dicapai masih belum signifikan atau bahkan sesuai dengan target. Indeks Kesehatan merupakan indikator yang kompleks, karena dipengaruhi beragam faktor, seperti kualitas lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan, pola hidup dan gaya hidup individu. Oleh karena itu, peningkatan Indeks Kesehatan perlu diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Upaya peningkatan kesehatan dioptimalkan dengan kebijakan pemeliharaan dan peningkatan sumberdaya kesehatan di Kabupaten Bondowoso. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama untuk kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan persalinan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Selama upaya peningkatan kesehatan di Bondowoso pada tahun 2023, masih terdapat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan.

Permasalahan

- 1) masih ada faktor yang menyebabkan indeks kesehatan belum terpenuhi
- 2) Masih ada ibu hamil K1 Akses (memeriksakan kehamilan setelah umur kehamilan 3 bulan), ibu hamil abortus 395
- 3) Masih ada ibu bersalin yang melahirkan di dukun
- 4) Masih tingginya komplikasi pada neonatus dan ibu hamil serta ibu bersalin karena persalinan caesar

- 5) Masih terbatasnya akses usia lanjut pada fasilitas kesehatan
- 6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat usia produktif untuk melakukan screening kesehatan jika tidak ada keluhan
- 7) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan screening kesehatan jika tidak ada keluhan

Solusi

- 1) memenuhi sarana prasarana kesehatan baik kualitas maupun kuantitasnya serta akses piuntuk ke pelayanan kesehatan
- 2) Optimalisasi screening terhadap semua ibu hamil
- 3) Kunjungan rumah kepada ibu hamil agar bersalin di fasilitas kesehatan
- 4) Optimalisasi screening terhadap semua ibu hamil sehingga tidak ada komplikasi pada neonatus
- 5) Melakukan screening kesehatan kepada usia lanjut dengan melakukan kunjungan rumah.
- 6) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan screening kesehatan
- 7) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan screening kesehatan

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan gender, perlindungan perempuan dan Anak, serta pemberdayaan pemuda dengan indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Gender mempunyai target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 92 terealisasi 91,17 atau mencapai 99,10% dengan kategori sangat berhasil.

Indikator status kabupaten layak anak mempunyai target yang ditetapkan tahun 2023 adalah Nindya tIndeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bondowoso sudah tercapai dengan baik. Hal ini dikarenakan Tingkat Pendidikan Antara Perempuan dan Laki - Laki sudah mulai seimbang. Begitu juga dengan dimensi Kesehatan, jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan antara laki - laki dan perempuan sudah mulai berimbang. Dari Faktor Ekonomi yang dapat dilihat adalah mulai seimbangnya formasi peluang kerja bagi laki - laki dan perempuan.

BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

3.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Perwakilan BKKBN propinsi Jawa Timur dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso Nomor 1315/HK.03/J1/2025 dan 440/236/430.9.7/2024 Tentang Perjanjian Kerjasama Antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso Tanggal 30 Januari 2024.

b. Gambaran Umum Pelaksaaan Tugas Pembantuan

Perjanjian ini dalam implementasinya untuk mencapai sasaran kinerja bersama program Bangga Kencana secara maksimal di Provinsi Jawa Timur sampai dengan akhir Tahun 2023 yang berbasis kinerja dan selanjutnya dituangkan dalam indikator kinerja porgram Bangga Kencana Provinsi Jawa Timur serta digunakan sebagai alat ukur prestasi kinerja.

c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

➤ Capaian Kinerja

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

NO	SASARAN KINERJA KABUPATEN BONDOWOSO	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN (%)
1	Angka kelahiran total (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,91	2,00	104,7%
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	67,60	81,04	119,9%
3	Presentase kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmeet Need)	3,18	2,3	127,67%

NO	SASARAN KINERJA KABUPATEN BONDOWOSO	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN (%)
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR15 - 19)	58,48	24,22	158,58%
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59,11	61,12	103,4%
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	19,30	20,7	107,2%
7	Persentase Kehamilan yang Tidak Diinginkan	12%	14,6%	78,33%
8	Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pascapersalinan	44%	41,04%	93,2%
9	Jumlah faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon	43	41	95,3%
10	Jumlah faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	43	41	95,3%
11	Jumlah faskes yang mendapat fasilitasi intensifikasi pelayanan KB dalam percepatn penurunan stunting	43	41	95,3%
12	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	12.510	24.861	198,7%
13	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan Genre	122	107	87%
14	Jumlah Kelompok BKL yang melaksanakan 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia	16	21	131,2%
15	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	203	33	16,2%

NO	SASARAN KINERJA KABUPATEN BONDOWOSO	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN (%)
16	Jumlah keluarga dengan Baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK	32.179	15.024	46,7%
17	Jumlah kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	16	16	100%
18	Jumlah kelompok UPPKA di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2	2	100%
19	Jumlah Rumah data Kependudukan paripurna di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan	10	10	100%
20	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	31	31	100%
21	Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting	1	1	100%
22	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	1	1	100%
23	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	77%	81,5%	105,8%

➤ Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM / KEG / SUB KEG / JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	Pelatihan Tim Pendamping Keluarga	382.115.000	382.115.000	-	100
2	Oerintasi pemberdayaan ekonomi keluarga	9.960.000	9.960.000	-	100

NO	PROGRAM / KEG / SUB KEG / JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
3	Fasilitasi pengumpulan dan updating data di rumah data kependudukan	4.500.000	4.500.000	-	100
4	Kegiatan workshop / orientasi verifikasi dan validasi	750.000	750.000	-	100
5	Kegiatan workshop / orientasi verifikasi dan validasi	2.130.000	2.130.000	-	100
6	Sosialisasi Program Genre bagi Duta Genre Desa	9.650.000	9.650.000	-	100
7	Internalisasi Pengasuhan Balita dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting kepada masyarakat	28.475.000	28.475.000	-	100
8	Tujuh Dimensi Lansia Tangguh	5.825.000	5.825.000	-	100
‘9	Orientasi Penggunaan KKA	29.660.000	29.660.000	-	100
10	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting	13.875.000	13.875.000	-	100
11	Penguatan Peyelenggaraan DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	8.575.000	8.575.000	-	100
12	Workshop Pemuakiran PPK-24 Bagi Kader	30.076.000	30.076.000	-	100
TOTAL		525.591.000	525.591.000		

d. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Tabel 3.2
Hambatan/Permasalahan
dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

No	Permasalahan	Solusi
1	Pola pikir dan adat budaya di Kabupaten Bondowoso menjadi permasalahan utama. Masih banyak orang tua yang merasa gelisah apabila anaknya tidak menikah cepat, takut menjadi gunjingan dan budaya bertunangan / nikah sirri dengan kedok menghindari zina	Advokasi dan KIE kepada berbagai lapisan masyarakat terutama dengan melibatkan tokoh agama dan organisasi pemuda dalam rangka meningkatkan usia ideal menikah bagi remaja
2	Masih banyak akseptor yang lebih memilih menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (pil, suntik, kondom)	Advokasi dan KIE kepada akseptor terkait penggunaan MKJP harus lebih dimaksimalkan lagi

2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso menerima pelaksanaan program/ kegiatan Dekonsentrasi / Banprog sebanyak 8 (delapan) paket program pelatihan yaitu: Program Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Pelatihan Berbasis Kompetensi.

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Dekonsentrasi

- 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Latihan Kerja Banyuwangi Tahun Anggaran 2024 Dipa Awal Nomer : SP DIPA-026.13.2.051102/202424 November 2023, Revisi 4 tanggal 21 Februari 2024 NOMOR : SP DIPA-026.13.2.051102/2024, Revisi 10 tgl 11 September 2024 NOMOR : SP DIPA-026.13.2.051102/2024.
- 2 Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Awal Tanggal 04 Januari 2024, TA. 2024, 23 Januari 2024 (Revisi 1), 20 November 2024 (Revisi 2)

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pelatihan berbasis kompetensi yang merupakan program dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banyuwangi yang dilaksanakan oleh UPTD – Pelatihan Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso terdiri dari :

1. Pelatihan Service Sepeda Motor Sistem Injeksi 280 JP (2 Paket 32 Orang);
2. Bahan Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran 260 JP (1 paket 16 Orng);

3. Pelatihan Plate Welder SMAW 2G/PC 260 JP (1 Paket 16 Orang);
4. Pelatihan Teknisi AC Resedential 260 JP (1 Paket 16 Orang);
5. Pelatihan Menjahit Pakaian Dengan Mesin Lockstich 260 JP (2Paket 16 Orang);
6. Pelatihan Teknisi Telepon Seluler Perangkat Keras 260 JP (1 Paket 16 Orang);
7. Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue 140 JP (1 Paket 16 Orang).

Keseluruhan pelatihan tersebut dilaksanakan di UPTD Pelatihan Kerja Bondowoso, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso.

c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Dekonsentrasi

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Pelaksanaan Dekonsentrasi

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja	Sumber Dana
Pelatihan Berbasis Kompetensi	Rp 70.784.000,-	Rp 700.137.604,-	98,50 %	APBN

- a. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian Permasalahan : Kurangnya sarana prasarana pendukung untuk kegiatan pelatihan sesuai skema pelatihan (SKKNI)
- Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian
- 1 Permasalahan : Kurangnya sarana prasarana pendukung untuk kegiatan pelatihan sesuai skema pelatihan (SKKNI)
 - 2 Solusi : Perlunya pengadaan sarana prasana dari pemerintah untuk kegiatan pelatihan sesuai skema pelatihan (SKKNI)

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Tabel 4.1
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2024

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian							keterangan	
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar					
		indikator	Target	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu			
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan		
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun						
	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun			
		Rata-rata kemampuan	Meningkat dari	Setiap tahun						

		literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	hasil dua tahun sebelumnya					
	Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

4.1.3 Anggaran

Tabel 4.2
Anggaran Dasar
Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BONDOWOSO	2,160,302,899,255
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	706,701,303,529
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	257,142,596,950
	APBD	234,863,121,950
	A. APBD MURNI	59,640,811,612
	C. APBD DAK FISIK	64,326,983,850
	D. APBD DAK NON FISIK	110,895,326,488
	DANA LAINNYA	22,279,475,000

Tabel 4.3
Anggaran Rincian Kegiatan
Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
1	PENGELOLAAN PENDIDIKAN IKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			207,955,596,950	171,731,124,025	82.58 %
					89,832,751,686	72,236,598,864	80.41 %
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	4,684,200,000	2,477,661,339	52.89 %
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	4,966,000,000	2,005,073,127	40.38 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	6,409,300,000	3,340,954,697	52.13 %
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	288,750,000	241,680,169	83.70 %
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakan Sekolah	Ruang	362,250,000	287,658,419	79.41 %
			Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	941,190,000	853,106,000	90.64 %
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	15,000,000	14,988,800	99.93 %
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	20,000,000	19,964,600	99.82 %
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	45,000,000	0	0%
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	3,770,000,000	3,715,560,000	98.56 %
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	125,000,000	122,831,100	98.26 %
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	35,000,000	28,048,700	80.14 %
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	48,664,376,886	48,549,349,075	99.76 %
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS	Orang	50,000,000	48,875,000	97.75 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			Sekolah Dasar				
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	9,131,700,000	3,358,812,732	36.78 %
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	10,000,000	8,588,400	85.88 %
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	10,000,000	9,250,000	92.50 %
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	10,000,000	8,399,700	84.00 %
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	317,983,600	288,736,600	90.80 %
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	30,000,000	28,288,200	94.29 %
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	25,000,000	23,245,300	92.98 %
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	75,000,000	73,255,000	97.67 %
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	2,986,250,000	817,860,865	27.39 %
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	94,500,000	93,667,969	99.12 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	261,028,200	257,917,200	98.81 %
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	6,505,223,000	5,562,825,872	85.51 %
					54,126,427,452	37,264,932,585	68.85 %
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	283,500,000	213,496,824	75.31 %
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	3,870,000,000	794,257,065	20.52 %
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	3,000,000,000	0	0%
			Pembangunan Laboratorium	Ruang	8,420,000,000	320,243,864	3.80 %
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	938,014,850	0	0%
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	3,416,400,000	3,387,350,521	99.15 %
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	4,180,174,000	3,391,999,318	81.14 %
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	81,987,000	61,940,652	75.55 %
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	346,500,000	273,691,155	78.99 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	1,153,452,000	925,178,427	80.21 %
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	92,153,000	70,299,494	76.29 %
			Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1,781,820,000	1,705,680,000	95.73 %
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	911,500,000	870,400,000	95.49 %
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	30,000,000	25,354,500	84.52 %
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	50,000,000	50,000,000	100.00 %
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	3,670,000,000	3,662,080,000	99.78 %
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	250,000,000	246,022,400	98.41 %
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	104,205,600	95,099,500	91.26 %
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	95,000,000	88,373,200	93.02 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	19,893,249,202	19,864,877,047	99.86 %
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	50,000,000	45,297,000	90.59 %
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	302,700,000	82,690,043	27.32 %
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	73,750,000	54,682,757	74.15 %
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	20,000,000	15,693,400	78.47 %
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	30,000,000	27,571,100	91.90 %
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	15,000,000	13,043,800	86.96 %
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	30,000,000	27,067,400	90.22 %
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	30,000,000	27,516,000	91.72 %
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	343,971,800	340,894,650	99.11 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SER APA N
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	250,000,000	250,000,000	100.00%
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	25,000,000	24,770,700	99.08%
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	50,000,000	48,766,740	97.53%
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	338,050,000	260,595,028	77.09%
3		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			40,257,190,000	39,415,979,426	97.91%
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	472,130,000	468,011,637	99.13%
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	1,500,000,000	1,497,775,060	99.85%
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	150,000,000	150,000,000	100.00%
			Pengadaan Mebel PAUD	Paket	2,350,000,000	2,350,000,000	100.00%
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	25,000,000	25,000,000	100.00%
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	1,480,000,000	1,478,200,000	99.88%
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Orang	12,621,600,000	12,583,200,000	99.70%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			Satuan PAUD				
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	50,000,000	18,400,000	36.80 %
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	200,000,000	192,409,460	96.20 %
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	19,809,000,000	19,269,990,000	97.28 %
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	15,000,000	14,384,800	95.90 %
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	10,000,000	8,048,900	80.49 %
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	15,000,000	8,225,800	54.84 %
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	127,660,000	111,580,950	87.40 %
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	35,000,000	32,364,800	92.47 %
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	25,000,000	22,986,000	91.94 %
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1,092,500,000	1,022,013,219	93.55 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	149,300,000	143,388,800	96.04 %
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	110,000,000	0	0%
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	20,000,000	20,000,000	100.00%
4		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan					
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Peserta didik	25,000,000	0	0%
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Orang	156,000,000	126,000,000	80.77%
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Orang	197,800,012	125,930,850	63.67%
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Satuan Pendidikan	166,727,400	164,967,500	98.94%
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah	Satuan Pendidikan	22,528,700,400	22,209,459,000	98.58%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			Nonformal/ Kesetaraan				
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	15,000,000	14,455,800	96.37 %
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	25,000,000	25,000,000	100.0 %
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	100,000,000	97,800,000	97.80 %
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	525,000,000	50,000,000	9.52 %
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
	Program Pengembangan Kurikulum				52,000,000	35,304,100	67.89 %
	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan				4,516,700,000	4,429,864,850	98.08 %
	Program Pengendalian Perizinan				59,350,000	56,485,050	95.17 %
	Program Indonesia Pintar Jenjang Sekolah Dasar				14,977,475,000	13,982,625,000	93.36 %
	Program Indonesia Pintar Jenjang				7,302,000,000	6,929,250,000	94.90 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	Sekolah Menengah Pertama						

4.1.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yg menangani SPM berjumlah 288 orang.

4.1.5 Hasil Capaian

Tabel 4.4
Indeks Hasil Capaian
Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2024

No	Kategori Indeks Pencapaian	Satuan	Indikator Output			Total Pencapaian
			Yang harus dilayani	Yang terlayani	Yang belum terlayani	
1	PAUD	Orang	34.342	34.342	0	98.65%
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	94.15	5.85	94.15 %
	2. Angka partisipasi murni	%	93.88	94.86	-0.98	100.00 %
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	64.17	65.93	-1.76	100.00 %
	4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	70.19	77.46	-7.27	100.00 %
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	1	1	0	100.00 %
	6. Kecukupan formasi guru ASN	%	1	1	0	100.00 %
	7. Indeks distribusi guru	%	0.5	0.5	0	100.00 %

No	Kategori Indeks Pencapaian	Satuan	Indikator Output			Total Pencapaian
			Yang harus dilayani	Yang terlayani	Yang belum terlayani	
	8. Proporsi PTK bersertifikat	%	1490	672	818	45.10 %
	9. Proporsi PTK penggerak*	%	1.14	1.14	0	100.00 %
2	Pendidikan Dasar	Orang	65.518	65.518	0	98.85%
	SD					94.84%
	1. Angka partisipasi kasar	%	102.53	102.01	0.52	99.49 %
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	99.96	0.0400000000000006	99.96 %
	3. Kemampuan literasi	Nilai	53.52	69.23	-15.71	100.00 %
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	39.68	63.07	-23.39	100.00 %
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	15.92	15.92	0	100.00 %
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	23.9	23.9	0	100.00 %
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	73.48	71.48	2	97.28 %
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71.2	71.98	-0.78	100.00 %
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.63	54.68	5.95	90.19 %
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	50	50	0	100.00 %
	11. Indeks distribusi guru	%	0.44	0.44	0	100.00 %
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	4112	1891	2221	45.99 %
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	1	1	0	100.00 %
	SMP					93.65%
	1. Angka partisipasi kasar	%	94.28	94.87	-0.59	100.00 %
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	99.32	0.68000000000001	99.32 %
	3. Kemampuan literasi	Nilai	64.45	58.52	5.93	90.80 %

No	Kategori Indeks Pencapaian	Satuan	Indikator Output			Total Pencapaian
			Yang harus dilayani	Yang terlayani	Yang belum terlayani	
3	4. Kemampuan numerasi	Nilai	63.28	56.27	7.01	88.92 %
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	6.75	6.75	0	100.00 %
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	18.5	18.5	0	100.00 %
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	69.63	65.89	3.74	94.63 %
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	67.38	70.98	-3.6	100.00 %
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.86	52.96	7.9	87.02 %
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	0.32	0.32	0	100.00 %
	11. Indeks distribusi guru	%	0.38	0.38	0	100.00 %
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	1316	747	569	56.76 %
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	1	1	0	100.00 %
	Pendidikan Kesetaraan	Orang	15.228	15.228	0	99.91%
	1. Angka partisipasi kasar	%	31.11	31.11	0	100.00 %
	2. Angka partisipasi sekolah	%	31.11	31.11	0	100.00 %
	3. Kemampuan literasi	Nilai	8.82	22.6	-13.78	100.00 %
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	17.64	22.3	-4.66	100.00 %
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	5.78	5.78	0	100.00 %
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.84	1.84	0	100.00 %
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	63.2	59.6	3.6	94.30 %
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	47.79	54.39	-6.6	100.00 %
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	45.77	48.79	-3.02	100.00 %

No	Kategori Indeks Pencapaian	Satuan	Indikator Output			Total Pencapaian
			Yang harus dilayani	Yang terlayani	Yang belum terlayani	
	10.Kecukupan formasi guru ASN	%	1	1	0	100.00 %
	11.Indeks distribusi guru	%	1	1	0	100.00 %
	12.Proporsi PTK bersertifikat	%	1	1	0	100.00 %
	13.Proporsi PTK penggerak*	%	1	1	0	100.00 %

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.5
Permasalahan dan Solusi
Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2024

NO	JENIS PERMASALAHAN
1	PENGUMPULAN DATA ; Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan 1) Masih rendahnya capaian literasi, numerasi 2) Pengurangan anggaran yang mengakibatkan kurang maksimalnya capaian program dan kegiatan. Solusi : Semaksimal mungkin menggunakan anggaran yang ada 3) Masih terdapat angka Droup Out (DO) peserta didik pada tingkat pendidikan dasar. Untuk mengurangi angka DO dilakukan evaluasi dan monitoring serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait (stakeholder). 4) Belum seluruhnya lembaga sekolah memiliki gedung Perpustakaan, Laboratorium dan Ruang Penunjang Lainnya. Untuk memenuhi kekurangan dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana pendidikan dengan mengusulkan melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN. 5) Masih terdapat gedung sekolah rusak berat dan rusak sedang, sehingga dapat dilakukan rehabilitasi melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN. 6) Belum terdistribusinya guru secara merata di wilayah Kabupaten Bondowoso yang diakibatkan untuk Kabupaten Bondowoso masih kekurangan guru yang signifikan sehingga masih banyak kelas yang diisi oleh tenaga sukarelawan, untuk melakukan pemerataan diupayakan penataan kembali mengacu pada hasil school mapping dan melalui Data pokok pendidikan (DAPODIK). 7) Penyediaan Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar bagi keluarga tidak mampu 8) Optimalisasi penggunaan Bantuan operasional sekolah (BOS) 9) Penyediaan biaya pembinaan bagi siswa berprestasi 10) Meningkatkan kerjasama dengan dunia Usaha dan Dunia Industri 11) Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini 12) Penyediaan Bantuan Operasional Madrasah Diniah 13) Peningkatan Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan 12) Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah. Upaya yang telah dilaksanakan adalah mengoptimalkan pendidikan kesetaraan untuk menjaring

NO	JENIS PERMASALAHAN
	penduduk usia 25 samapai 45 tahun agar kembali bersekolah melalui paket A, B, dan C sehingga diharapkan dapat meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bondowoso
2	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ; Proses penghitungan kebutuhan pembiayaan SPM pendidikan adalah dengan melihat capain SPM pada layanan dasar dalam beberapa tahun terakhir dan melihat alokasi anggaran yang tersedia. penghitungan alokasi anggaran juga melihat capaian serapan anggaran dalam beberapa tahun terakhir dengan memperhatikan jumlah ruang kelas, jumlah rombongan belajar, kebutuhan pemenuhan beban mengajar, jumlah jam mata pelajaran maupun struktur kurikulum yang digunakan. sehingga diharapkan proses penghitungan kebutuhan pembiayaan SPM dapat sesuai dengan data dan keadaan.
3	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ; Tahap awal Perencanaan dan penganggaran SPM pendidikan adalah dengan memilah terlebih dahulu kegiatan-kegiatan maupun sub kegiatan yang masuk dalam SPM. sehingga ketika kita merencanakan anggaran spm sudah memenuhi Standart dan ketentuan mengenai jenis dan mutu layanan dasar pendidikan yang wajib diberikan kepada penerima layanan. Perencanaan dan penganggaran SPM Pendidikan dilakukan dengan mengintegrasikan rencana pencapaian SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RPLMD, Renstra-PD dan Renja-PD sedangkan untuk penganggarannya disesuaikan dengan APBD dan RKA-PD dengan memperhatikan : 1. Memastikan perencanaan dan penganggaran sudah sejalan dengan strategi pencapaian tujuan pembangunan, baik pusat maupun daerah. 2. Alokasi anggaran bersifat efektif dan efisien 3. Transparan dan akuntabel 4. mengintegrasikan rencana pencapaian SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
4	PELAKSANAAN ; Dalam tahap pelaksanaan diharapkan menjangkau semua penerima layanan SPM sehingga pemerintah bisa menjamin peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat dengan memperhatikan proinsip-prinsip penerapan SPM sesuai dengan kewenangan masing-masing sehingga ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran dapat terlaksana dengan baik. Terakhir pemerintah daerah bisa melaporkan pelaksanaan SPM Pendidikan sesuai target dan capaian penerapan SPM, menyampaikan kendala penerapan SPM guna perencanaan dan penganggaran SPM di tahun berikutnya.
5	LAIN – LAIN ; Guna menjamin ketercapaian pelaksanaan SPM Pendidikan di semua daerah di Indonesia, seharusnya pemerintah pusat dapat langsung mengintegrasikan dan mengunci kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan SPM. sehingga daerah tidak perlu lagi memilah kegiatan-kegiatan apa saja yang berkaitan dengan SPM. sehingga penerapan SPM dapat terlaksana di seluruh daerah tanpa terkecuali.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. pelayanan kesehatan balita;
5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus).

4.2.2 Target Pencapaian Spm

Tabel 4.6
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2024

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian							keterangan	
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar					
		indikator	Target	Batas waktu	Indicator	Target	Batas waktu			
1	Kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal bidang KESEHATAN		
2	Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun			
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber	100%	Setiap tahun			

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			keterangan
		indikator	Target	Batas waktu	Indicator	Target	Batas waktu	
		kesehatan			daya manusia			
4	kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
5	kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
6	kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
7	kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
8	kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
9	kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			keterangan
		indikator	Target	Batas waktu	Indicator	Target	Batas waktu	
		atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan						
10	Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
11	kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
12	kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

4.2.3 Anggaran

Tabel 4.7
Anggaran Dasar
Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BONDOWOSO	2,160,302,899,255
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	253,112,741,179
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	33,544,824,576
	APBD	33,544,824,576
	B. APBD DAU	7,081,688,990
	C. APBD DAK FISIK	3,204,981,655
	D. APBD DAK NON FISIK	11,715,743,950
	E. DANA BAGI HASIL	11,542,409,981

Tabel 4.8
Anggaran Rincian Kegiatan
Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
1	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Penyediaan Layanan Kesehatan Ibu Hamil		7,204,717,710	6,511,351,000	90.38 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	2,132,753,000	1,966,204,700	92.19 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	335,231,000	286,293,000	85.40 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	372,561,950	106,669,000	28.63 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	46,000,000	33,587,450	73.02 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan	Orang	577,570,000	539,358,700	93.38 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	42,045,000	40,297,450	95.84 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	18,340,000	15,236,000	83.08 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	6,540,000	6,400,000	97.86 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	1,571,926,560	1,488,956,000	94.72 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	43,995,000	42,607,000	96.85 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	1,750,316,200	1,698,843,300	97.06 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan	Orang	307,439,000	286,898,400	93.32 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota				25,057,760,826	22,468,825,898	89.67 %
3	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,282,346,040	1,104,795,195	86.15 %

4.2.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yg menangani SPM di Dinas Kesehatan sebanyak 10 orang.

4.2.5 Hasil Capaian

Tabel 4.9
Indeks Hasil Capaian
Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2024

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCAWAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYANI	BELUM TERLAYANI		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	12.231	7652	4579	62.56%	66.64 %
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	10086	3502	6584	34.72 %	
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x	Tablet	1054260	1054260	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
	jumlah ibu hamil)						
3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan		Orang	12231	7652	4579	62.56 %	
4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB		Paket	12231	7652	4579	62.56 %	
5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah		Paket	12231	7652	4579	62.56 %	
6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)		Paket	12231	7652	4579	62.56 %	
7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV		Paket	12231	12231	0	100.00 %	
8 . Kartu ibu/rekam medis ibu		Paket	12231	12231	0	100.00 %	
9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		Buku	12231	7652	4579	62.56 %	
10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		Paket	219	219	0	100.00 %	
11 . Gel USG (untuk Puskesmas		Botol	822	822	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
	yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)						
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	122	122	0	100.00 %	
	13 . Tenaga (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)kesehatan : Perawat	Orang	1202	1202	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	641	641	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	144	144	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	63	63	0	100.00 %	
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada	Orang	12231	7652	4579	62.56 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
	trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)						
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang	12231	9428	2803	77.08%	81.67 %
	1 . Formulir partografi	Formulir	9428	9428	0	100.00 %	
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	9428	9428	0	100.00 %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	9428	9428	0	100.00 %	
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	219	219	0	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	122	122	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	641	641	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
3	7 . Tenaga kesehatan : Perawat(angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	1202	1202	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	144	144	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	63	63	0	100.00 %	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	1154	8706	2848	75.35%	79.43 %
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	8807	5107	3700	57.99 %	
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	6740	5580	1160	82.79 %	
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	8706	8706	0	100.00 %	
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	8706	8706	0	100.00 %	
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	8706	8706	0	100.00 %	
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	8706	8706	0	100.00 %	
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	219	219	0	100.00 %	
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	125	125	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	641	641	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
4	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1202	1202	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	144	144	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	50	50	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	63	63	0	100.00 %	
	14 . Kader Kesehatan	Orang	5396	5396	0	100.00 %	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	45327	44201	1126	97.52%	96.85 %
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	44201	44201	0	100.00 %	
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	44201	44201	0	100.00 %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	44201	44201	0	100.00 %	
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	9273	9650	-377	100.00 %	
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	11742	59800	-48058	100.00 %	
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	1408	2457	-1049	100.00 %	
	7 . Vaksin imunisasi	Vaksin	4404	4657	-253	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
	dasar: Polio Tetes						
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	2202	3481	-1279	100.00 %	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib	Vaksin	6296	4000	2296	63.53 %	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	1101	1101	0	100.00 %	
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	4489	657	3832	14.64 %	
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	2445	2668	-223	100.00 %	
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	50000	50000	0	100.00 %	
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	59	59	0	100.00 %	
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	1	1	0	100.00 %	
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	118	118	0	100.00 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	641	641	0	100.00 %	
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1202	1202	0	100.00 %	
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	63	63	0	100.00 %	
	20 . Guru PAUD	Orang	131	131	0	100.00 %	
	21 . Kader Kesehatan	Orang	5475	5475	0	100.00 %	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	orang	91784	87724	4060	95.58%	96.46 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	25	25	0	100.00 %	
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	25	25	0	100.00 %	
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	21750	21750	0	100.00 %	
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	986	986	0	100.00 %	
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia	Formulir	986	986	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
	sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)						
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	2016470	2016470	0	100.00 %	
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Alat	25	25	0	100.00 %	
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di	Strip	21750	21750	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
	Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)						
9 .	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	25	25	0	100.00 %	
10 .	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	1045	1045	0	100.00 %	
11 .	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	164	164	0	100.00 %	
12 .	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	641	641	0	100.00 %	
13 .	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1202	1202	0	100.00 %	
14 .	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	63	63	0	100.00 %	
15 .	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	144	144	0	100.00 %	
16 .	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	87	87	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	450	450	0	100.00 %	
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	1876	1876	0	100.00 %	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	499700	500201	501	100%	99.68 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	0	100.00 %	
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	1120	1120	0	100.00 %	
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	448	448	0	100.00 %	
	4 . Alat : Glukometer	Unit	244	244	0	100.00 %	
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	25	25	0	100.00 %	
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	492002	492002	0	100.00 %	
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	26	26	0	100.00 %	
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	23000	23000	0	100.00 %	
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	25	25	0	100.00 %	
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru	Dokumen	25	25	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
	Obstrutif Kronis/PPOK)						
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	75	75	0	100.00 %	
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	25	25	0	100.00 %	
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	1343	939	404	69.92 %	
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	118	118	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	641	641	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1202	1202	0	100.00 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	63	63	0	100.00 %	
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	87	87	0	100.00 %	
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1095	1095	0	100.00 %	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Orang	132489	109138	23351	82.38%	85.90 %
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar	Paket	219	219	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
	lengan atas, dan tensimeter						
2 .	Glukometer/ala t pemeriksaan gula darah	Paket	219	219	0	100.00 %	
3 .	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	219	219	0	100.00 %	
4 .	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	219	219	0	100.00 %	
5 .	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	25	25	0	100.00 %	
6 .	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	25	25	0	100.00 %	
7 .	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	219	219	0	100.00 %	
8 .	Tenaga medis : Dokter	Orang	118	118	0	100.00 %	
9 .	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	641	641	0	100.00 %	
10 .	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1202	1202	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
8	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	63	63	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	87	87	0	100.00 %	
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	435	435	0	100.00 %	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	70519	71154	635	100%	100%
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	25	25	0	100.00 %	
	2 . Obat Hipertensi	Paket	105185	105185	0	100.00 %	
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	448	448	0	100.00 %	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	25	25	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	25	25	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
9	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	118	118	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	641	641	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1202	1202	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	63	63	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	50	50	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	144	144	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	87	87	0	100.00 %	
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	12039	12155	116	100%	100%
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	12155	12155	0	100.00 %	
	2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	244	244	0	100.00 %	
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan	Unit	492002	492002	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
	kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet						
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	25	25	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	25	25	0	100.00 %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	118	118	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	641	641	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
10	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1202	1202	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	144	144	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	87	87	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	63	63	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	71	71	0	100.00 %	
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang	1505	1635	130	100%	100%
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	25	25	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenus	25	25	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui	Formulir	25	25	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
	aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)						
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	25	25	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	25	25	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	25	25	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	25	25	0	100.00 %	
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	1	1	0	100.00 %	
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	1	1	0	100.00 %	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	11389	13345	1956	100%	100%

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	0	100.00 %	
	2 . Reagen Zn TB	Kit	119	119	0	100.00 %	
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	2663	2663	0	100.00 %	
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen , Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	25	25	0	100.00 %	
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	12000	12000	0	100.00 %	
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	25	25	0	100.00 %	
	7 . Pedoman/Stand ar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	25	25	0	100.00 %	
	8 . Tuberkulin	Vial	702	702	0	100.00 %	
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	125	125	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1202	1202	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	144	144	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga	Orang	87	87	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
	Kesehatan Masyarakat						
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	71	71	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	19	19	0	100.00 %	
	15 . Kader Kesehatan	Orang	125	125	0	100.00 %	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang	13817	16154	2337	100%	100%
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	0	100.00 %	
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	14000	14000	0	100.00 %	
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	28	28	0	100.00 %	
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi	Paket	28	28	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYA NI	BELUM TERLAY ANI		
	nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK						
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	118	118	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	641	641	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1202	1202	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	71	71	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	87	87	0	100.00 %	
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	25	25	0	100.00 %	

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.10
Permasalahan dan Solusi
Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2024

NO	JENIS
1	PENGUMPULAN DATA ; Pengumpulan Data secara berjenjang dari rekapitulasi hasil pelayanan ponkesdes, pustu, puskesmas membutuhkan waktu yang panjang dikarenakan masih ada validasi data tiap jenjangnya
2	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ; Kebutuhan Vaksin yang dropping pusat ada beberapa yang masih kurang dari jumlah sasaran
3	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ; Anggaran untuk SPM sudah diprioritaskan akan tetapi juga harus berbagi dengan program prioritas Nasional yang lain seperti Stunting
4	PELAKSANAAN ; Tingginya Sasaran SPM sesuai KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/140/2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/5675/2021 TENTANG DATA PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2021-2025 pada beberapa indikator SPM yang berdampak pada capaian yang rendah karena jumlah sasaran berbeda dengan jumlah riil
5	LAIN-LAIN ; Regulasi yang dinamis dan sering berubah membutuhkan waktu untuk memahami dan diimplementasikan di daerah.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Tabel 4.11
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2024

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						keterangan	
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar				
		indikator	Target	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu		
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber	100%	Setiap tahun	Sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal bidang PEKERJAAN	

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						keterangan	
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar				
		indikator	Target	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu		
		pokok air minum sehari-hari			daya manusia			UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun		

4.3.3 Anggaran

Tabel 4.12
Anggaran Dasar
Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BONDOWOSO	2,160,302,899,255
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	63,525,868,210
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	32,612,296,235
	APBD	32,612,296,235
	B. APBD DAU	10,445,151,235
	C. APBD DAK FISIK	22,167,145,000
	APBD KAB. BONDOWOSO	2,160,302,899,255
	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	63,525,868,210

Tabel 4.13
Anggaran Rincian Kegiatan
Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSAAN	SERAPAN
1	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			17,365,127,834	14,962,244,884	86.16%
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi	Dokumen	350,000,000	345,585,450	98.74%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCA NAAN	PELAKSA NAAN	SERAPAN
		(SPAM) di Daerah Kabupaten	dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	17,015,127,834	14,616,659,434	85.90 %
2	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten			15,247,168,401	15,049,909,299	98.71 %
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	14,747,168,401	14,562,765,413	98.75 %	
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	500,000,000	487,143,886	97.43 %	

4.3.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang menangani SPM adalah 1 orang.

4.3.5 Hasil Capaian

Tabel 4.14
Indeks Hasil Capaian
Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2024

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCAAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYANI	BELUM TERLAYANI		
1	PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI					100%	
	JARINGAN PERPIPAAN	Orang	5577	5577	0	100%	
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	1859	1859	0	100.00 %	
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang	Rumah Tangga	1859	1859	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYANI	BELUM TERLAYANI		
	menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau						
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN						
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	1	0	1	100.00 %	
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak	Rumah Tangga	1	0	1	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYANI	BELUM TERLAYANI		
	berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau						
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	orang	2868	2868	0	100%	
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	956	956	0	100.00 %	
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan	Rumah Tangga	1	0	1	100.00 %	

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYANI	BELUM TERLAYANI		
	rumah yang terkoneksi ke SPALD-T						
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	956	956	0	100.00 %	

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.15
Permasalahan dan Solusi
Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2024

NO	JENIS
1	PENGUMPULAN DATA ; Belum adanya/tersedianya data pada tahun lama sehingga menyebabkan kecocokan pada data terbaru
2	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ; Perencanaan terkendala pada perubahan lokasi kegiatan yang berubah sehingga mengakibatkan pada waktu mulai pekerjaan, Penganggaran mengalami perubahan beberapa kali baik bertambah atau berkurang dalam tahun berjalan akibat persegeseran pada pagu anggaran
3	PELAKSANAAN ; Kegiatan Air Limbah masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan, terdapat beberapa kendala seperti tenaga kerja tukang dan pekerja yang kurang dan beralih pekerjaan, dropping bahan dan material terkendala akses dan lokasi yang sulit, Kegiatan Air Minum masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan, terdapat beberapa kendala pada pengeboran yang belum juga keluar mata air sehingga harus berpindah lokasi titik pengeboran, pemasangan sambungan rumah dan perpipaan terkendala, jadi capaian masih tergolong rendah

4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Tabel 4.16
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tahun Anggaran 2024

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						keterangan	
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar				
		indikator	Target	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu		
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal bidang PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun		

4.4.3 Anggaran

Tabel 4.17
Anggaran Dasar
Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tahun Anggaran 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BONDOWOSO	2,160,302,899,255
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	63,525,868,210
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	380,000,000
	APBD	380,000,000
	B. APBD DAU	320,000,000
	F. KERJASAMA	60,000,000

Tabel 4.18
Anggaran Rincian Kegiatan
Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
1	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten			0	0	0
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit rumah	<u>320,000,000</u>	<u>320,000,000</u>	100.00%
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB						

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	KEGIATAN LAINYA						
	Pembangunan rumah bagi korban bencana oleh Desa Suling Kulon Kecamatan Cermee				40,000,000	40,000,000	100.00 %
	Pembangunan rumah bagi korban bencana oleh Desa Mengok Kecamatan Pujer				20,000,000	20,000,000	100.00 %

4.4.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang menangani SPM adalah 2 (DUA) orang.

4.4.5 Hasil Capaian

Tabel 4.19
Indeks Hasil Capaian
Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tahun Anggaran 2024

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Orang	57	57	0	100%
	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	19	19	0	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	Orang	0	0	0	100%

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	
	Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten					

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.20
Permasalahan dan Solusi
Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tahun Anggaran 2024

NO	JENIS
1	PENGUMPULAN DATA ; Pengumpulan data dilakukan Pasca Bencana. Pembangunan Kembali Rumah Bencana untuk klasifikasi dengan Rumah Rusak Berat
2	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ; Telah disediakan anggaran sebanyak 20 unit Pembangunan Kembali Rumah Bencana untuk tahun 2024
3	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ; Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Bondowoso tidak ada masalah, akan tetapi Perencanaan dan Penganggaran telah disediakan di tahun berjalan, sehingga ketika terjadi bencana, maka akan langsung dilaksanakan Pembangunan Kembali Rumah Bencana di tahun tersebut. Untuk Tahun 2024 disediakan anggaran sebanyak 20 Unit Pembangunan Kembali Rumah Bencana. Pembangunan Kembali Rumah Bencana khusus untuk Klasifikasi dengan Rusak Berat
4	PELAKSANAAN ; Akses jalan menuju lokasi Pembangunan Kembali Rumah Bencana untuk mobilitas bahan kurang memadai. 2. Pada saat Pembangunan Kembali Rumah Bencana cuaca sering tidak menentu/ hujan, sehingga menghambat pekerjaan
5	LAIN-LAIN ; Masyarakat perlu memahami pentingnya mitigasi bencana, untuk atas nama SUKARWI, ZUBAERI dan JUMATI dibangun oleh desa yang bersangkutan

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. pelayanan informasi rawan bencana;

3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Tabel 4. 21
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun Anggaran 2024

N o	Jenis pelayana n dasar	Indikator kinerja capaian						keterangan	
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar				
		indikator	Target	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu		
1	Pelayana n ketentera man dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperole h layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/ Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal bidang KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN/ KOTA	
2	Pelayana n informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperole h layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun		
3	Pelayana n pencegah an dan kesiapsia gaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperole h layanan Pencegahan dan kesiapsiaga an terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun		

N o	Jenis pelayana n dasar	Indikator kinerja capaian						
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			keterangan
		indikator	Target	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu	
4	Pelayana n penyelam atan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperole h layanan penyelamat an dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
5	Pelayana n penyelam atan dan evakuasi korban kebakara n	Jumlah Warga Negara yang memperole h layanan penyelamat an dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

4.5.3 Anggaran

Tabel 4.22
Anggaran Dasar
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun Anggaran 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BONDOWOSO	2,160,302,899,255
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	11,999,633,100
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	11,999,633,100
	APBD	11,999,633,100
	B. APBD DAU	6,485,497,500
	E. DANA BAGI HASIL	5,514,135,600

Tabel 4.23
Anggaran Rincian Kegiatan
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERA PAN
1	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				8,660,383,600	7,487,156,702	86.45 %
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	3,019,248,000	2,949,395,346	97.69 %
			Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	36,500,000	20,168,400	55.26 %
			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	100,000,000	90,037,338	90.04 %
			Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	245,000,000	229,804,408	93.80 %
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	Laporan	5,000,000	4,960,000	99.20 %
					2,532,748,000	2,505,090,200	98.91 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SAT UAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERA PAN
			Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	100,000,000	99,335,000	99.34 %
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati			5,571,135,600	4,537,761,356	81.45 %
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	2,430,654,240	1,893,175,305	77.89 %
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	3,083,481,360	2,596,594,625	84.21 %
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap	Laporan	57,000,000	47,991,426	84.20 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	70,000,000	0	0%
2	PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				3,384,623,500	3,299,780,361	97.49 %
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	97,353,600	96,533,964	99.16 %
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	2,494,722,800	2,460,963,614	98.65 %
					415,432,000	411,481,300	99.05 %
			Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	45,271,000	45,271,000	100.00 %
			Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	31,808,500	31,298,500	98.40 %
			Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	19,109,900	19,029,900	99.58 %
			Penyediaan Peralatan	Unit	37,999,000	35,955,000	94.62 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERA PAN
			Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ko ta				
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	1,190,571,500	1,172,385,700	98.47 %
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	754,530,900	745,542,214	98.81 %
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			667,547,100	618,755,183	92.69 %
			Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	93,080,000	70,800,000	76.06 %
			Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	12,181,000	12,041,000	98.85 %
			Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	70,331,900	54,286,900	77.19 %
			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	483,000,000	473,637,083	98.06 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	8,954,200	7,990,200	89.23 %
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			125,000,000	123,527,600	98.82 %
			Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	10,000,000	9,984,100	99.84 %
			Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	30,000,000	29,031,200	96.77 %
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASN A) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	85,000,000	84,512,300	99.43 %
3	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				454,626,000	446,214,650	98.15 %
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	375,300,000	368,783,250	98.26 %
			Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	18,000,000	16,335,000	90.75 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
		Kabupaten					
		Pemberdayaan			47,462,000	45,829,300	96.56 %
		Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	12,000,000	10,492,300	87.44 %
		Penyelenggaraan	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	35,462,000	35,337,000 B	99.65 %
		Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			31,864,000	31,602,100	99.18 %
		Penyelenggaran operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Penyelenggaran operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	10,000,000	9,929,000	99.29 %
		Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	10,000,000	9,896,000	98.96 %
		Pengadaan sarana dan	Pengadaan sarana dan	Unit	11,864,000	11,777,100	99.27 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi				

4.5.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang menangani SPM sebanyak 121 orang dari Satpol PP dan 29 orang dari BPBD.

4.5.5 Hasil Capaian

Tabel 4.24
Indeks Hasil Capaian
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun Anggaran 2024

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			PENCAPAIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)	Orang	1967	1967	0	100%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	35	35	0	100.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas,	Dokumen	5	5	0	100.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENC APAI AN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLA YANI	BELUM TERLAYANI	
	pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)					
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	83	83	0	100.00 %
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Doku men	1	1	0	100.00 %
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	Orang	19225	19225	0	100%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen	Doku men	1	1	0	100.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENC APAI AN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLA YANI	BELUM TERLAYANI	
	Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	19225	19225	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	1100	1100	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	14	14	0	100.00 %
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	Orang	1100	1100	0	100%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	667	667	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	26	24	2	92.31 %
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	Orang	925	925	0	100%
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas	Posko	3	3	0	100.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENC APAI AN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLA YANI	BELUM TERLAYANI	
	penanganan darurat bencana)					
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	925	925	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	3	3	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layan an	1	1	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layan an	925	925	0	100.00 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Orang	81	81	0	100%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layan an	18	18	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadam di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	3	3	0	100.00 %
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar	Unit	26	26	0	100.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENC APAI AN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLA YANI	BELUM TERLAYANI	
	sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)					
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	12	9	3	75.00 %
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layan an	85	78	7	91.76 %
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layan an	3	3	0	100.00 %

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.25
Permasalahan dan Solusi
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun Anggaran 2024

NO	JENIS
1	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ; terbatasnya personil di BPBD Kab. Bondowoso dalam melakukan penghitungan kebutuhan secara detail
2	PELAKSANAAN ; keterbatasan personil kebencanaan, sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran di kabupaten bondowoso mengakibatkan target yang sudah direncanakan sulit tercapai, akan tetapi BPBD kabupaten

NO	JENIS
	bondowoso melaksanakan tugas semaksimal mungkin dengan memanfaatkan segala keluatan dan kemampuan yang ada
3	LAIN-LAIN ; Topografi Kabupaten bondowoso yaitu perbukitan dan pegunungan, sehingga mengakibatkan potensi bencana yang mungkin terjadi dan dampak bencana yang besar

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Tabel 4. 26
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Sosial Tahun Anggaran 2024

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas waktu	Indikator	Target	Batas waktu	
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/ Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal bidang KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN/KOTA
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber	100%	Setiap tahun	

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas waktu	Indikator	Target	Batas waktu	
		layanan informasi rawan bencana			daya manusia			
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

4.6.3 Anggaran

Tabel 4.27
Anggaran Dasar
Urusan Sosial Tahun Anggaran 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BONDOWOSO	2,160,302,899,255
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	2,053,630,000

NO	PENDANAAN	PAGU
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	2,053,630,000
	APBD	2,053,630,000
	B. APBD DAU	2,053,630,000

Tabel 4.28
Anggaran Rincian Kegiatan
Urusan Sosial Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
1	REHABILITASI SOSIAL				2,453,630,000	2,070,763,389	84.40 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar			2,003,320,000	1,800,547,319	89.88 %
		Penyanda	Penyediaan permakana	Orang	265,820,000	263,100,800	98.98 %
		ng	Penyediaan sandang	Orang	20,000,000	20,000,000	100.00 %
		Disabilitas	Penyediaan alat bantu	Orang	127,500,000	105,449,000	82.71 %
		Terlantar, Anak	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	15,000,000	15,000,000	100.00 %
		Terlantar, Lanjut Usia	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	550,000,000	505,044,819	91.83 %
		Terlantar, serta Gelandangan	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	550,000,000	494,066,100	89.83 %
		Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi pembuatan	Orang	15,000,000	8,730,000	58.20 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				
			Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	400,000,000	348,268,600	87.07 %
			Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	20,000,000	13,020,000	65.10 %
			Pemberian layanan kedaruratan	Orang	20,000,000	14,918,000	74.59 %
			Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	20,000,000	12,950,000	64.75 %
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten			450,310,000	270,216,070	60.01 %
			Penyediaan makanan	Orang	250,000,000	129,436,530	51.77 %
			Penyediaan sandang	Orang	140,310,000	107,900,000	76.90 %
			Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	20,000,000	3,000,000	15.00 %
			Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	20,000,000	18,915,000	94.58 %
			Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	20,000,000	10,964,540	54.82 %

4.6.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang menangani SPM sebanyak 10 orang.

4.6.5 Hasil Capaian

Tabel 4.29
Indeks Hasil Capaian
Urusan Sosial Tahun Anggaran 2024

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENCA PIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAY ANI	BELUM TERLAYANI	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	690	687	3	99.57%
2	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	20	18	2	90.00 %
3	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	167	167	0	100.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENCA PIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAY ANI	BELUM TERLAYANI	
4	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	10	10	0	100.00 %
5	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	15	15	0	100.00 %
6	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	291	291	0	100.00 %
7	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100.00 %
8	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima	Orang	100	100	0	100.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENCA PIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAY ANI	BELUM TERLAYANI	
	pelayanan/olahraga/ou tbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsi sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
9	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	30	30	0	100.00 %
10	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	0	100.00 %
11	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	20	20	0	100.00 %
12	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar					

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENCA PIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAY ANI	BELUM TERLAYANI	
	puskesmas/klinik/rumah sakit)					
13	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	10	9	1	90.00 %
14	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	5	5	0	100.00 %
15	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	10	10	0	100.00 %
16	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Orang	817	817	0	100%
17	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada	Orang	15	15	0	100.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENCA PIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAY ANI	BELUM TERLAYANI	
	dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					
18	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	10	10	0	100.00 %
19	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	300	300	0	100.00 %
20	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	16	16	0	100.00 %
21	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENCA PIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAY ANI	BELUM TERLAYANI	
22	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outline/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsi sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	300	300	0	100.00 %
23	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	130	130	0	100.00 %
24	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	0	100.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENCA PIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAY ANI	BELUM TERLAYANI	
25	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	10	10	0	100.00 %
26	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	10	10	0	100.00 %
27	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	10	10	0	100.00 %
28	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	5	5	0	100.00 %
29	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	1497	1497	0	100%
30	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa	Orang	10	10	0	100.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENCA PIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAY ANI	BELUM TERLAYANI	
	pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					
31	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	10	10	0	100.00 %
32	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	1325	1325	0	100.00 %
33	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	20	20	0	100.00 %
34	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod,	Orang	50	50	0	100.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENCA PIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAY ANI	BELUM TERLAYANI	
	tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)					
35	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100.00 %
36	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ou tbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsi sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	15	15	0	100.00 %
37	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi	Orang	15	15	0	100.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENCA PIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAY ANI	BELUM TERLAYANI	
	melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)					
38	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	0	100.00 %
39	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	10	10	0	100.00 %
40	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	10	10	0	100.00 %
41	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	10	10	0	100.00 %
42	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	10	10	0	100.00 %
43	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial	Orang	54	54	0	100%

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENCA PIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAY ANI	BELUM TERLAYANI	
	Khususnya Geladangan dan Pengemis di Luar Panti					
44	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya geladangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	54	54	0	100.00 %
45	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada geladangan dan pengemis	Orang	54	54	0	100.00 %
46	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di	Orang	85	85	0	100.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENCA PIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAY ANI	BELUM TERLAYANI	
	desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)					
47	4 . Penyediaan sandang(berupa pembelian pakaian, 48pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	54	54	0	100.00 %
48	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	54	54	0	100.00 %
49	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ou tbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsi sosial	Orang	150	150	0	100.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENCA PIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAY ANI	BELUM TERLAYANI	
	(seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
50	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui 51lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	54	54	0	100.00 %
51	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	50	50	0	100.00 %
52	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ruma h sakit)	Orang	200	30	170	15.00 %
53	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	54	54	0	100.00 %
54	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi	Orang	54	54	0	100.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENCA PIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAY ANI	BELUM TERLAYANI	
	keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)					
55	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan 56 lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	200	200	0	100.00 %
56	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten	Orang	276	276	0	100%
57	1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	150	150	0	100.00 %
58	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai	Orang	75	72	3	96.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			PENCA PIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAY ANI	BELUM TERLAYANI	
	kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
59	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	1	1	0	100.00 %
60	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	25	18	7	72.00 %
61	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	200	200	0	100.00 %

4.6.6 Kendala, Permasalahan Dan Solusi

Tabel 4.30
Permasalahan dan Solusi
Urusan Sosial Tahun Anggaran 2024

5.

NO	JENIS PERMASALAHAN
1	PENGUMPULAN DATA ; Verval Data DTKS
2	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ; Perlu validasi ulang terhadap pemenuhan sasaran penerima layanan
3	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ; Updating sub kegiatan pengampu layanan SPM
4	PELAKSANAAN ; Pemahaman masyarakat terutama terhadap Materi Sosialisasi (Pelayanan Adopsi, Pengaduan Bansos) masih rendah
5	LAIN-LAIN ; Peningkatan SDM bagi Fasilitator Rehabilitasi Sosial

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD ini memuat informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 yang menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso.

Pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bondowoso merupakan upaya maksimal dan hasil kerja keras dari semua pihak, baik jajaran eksekutif, legislatif maupun masyarakat dan pihak terkait serta instansi vertikal di daerah. Capaian tersebut harus dijadikan pemicu untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. LPPD ini juga memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat memacu kreatifitas dan kerja keras menuju terwujudnya “BONDOWOSO MANDIRI EKONOMI, LESTARI, SEJAHTERA, ADIL DAN TERDEPAN DALAM BINGKAI IMAN DAN TAKWA”.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024, selain prestasi dan keberhasilan juga terdapat kelemahan dan kekurangan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu melalui mekanisme penyusunan LPPD ini, kami mengharapkan rekomendasi konstruktif agar upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan upublik dan peningkatan daya saing daerah di masa yang akan datang dapat berjalan lebih baik dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat Bondowoso. Semoga Alloh, SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahNya kepada kita sekalian. Aamiin.

Bondowoso, Maret 2025



Abd.Hamid Wahid, M.Ag